

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**SOPIAH RANTI
NPM : 157310398**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

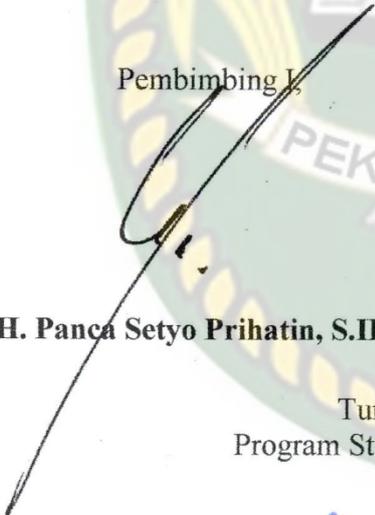
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Sopiah Ranti
NPM : 157310398
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sut dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam Ujian Konferehensif

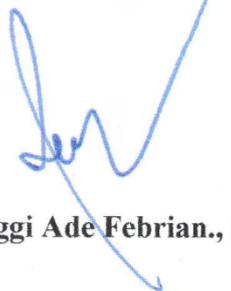
Pembimbing I,

Pekanbaru, 03 September 2020
Pembimbing II,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Nina Yuslaini, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sopiah Ranti
NPM : 157310398
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

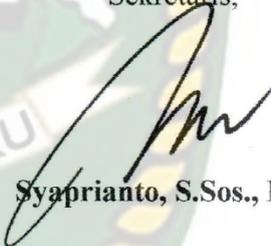
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 03 September 2020

Ketua,

Sekretaris,


Drs. H. Zaini Ali, M.Si


Syaprianto, S.Sos., M.Si

Anggota,


Nina Yuslimi, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

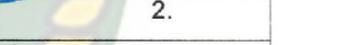
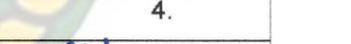
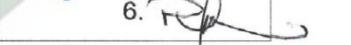
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 319/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 22 Juli 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 23 Juli 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sopiah Ranti
NPM : 157310398
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu dalam Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Tembulun .**

Nilai Ujian : Angka : " 73,16 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 23 Juli 2020
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 319 /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Sopiah Ranti**
N P M : 157310398
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Di Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Tembulun.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Drs. H. Zaini Ali.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Sri Maulidiah.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr.H.Panca Setyo Prihati.,S.IP.M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Nina Yuslaini.,S.IP.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Rijalul Fikri.,S.Sos.,MA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Juli 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip SK Penguji.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sopiah Ranti
NPM : 157310398
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 03 September 2020

An Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,



Drs. H. Zaini Ali, M.Si



Syaprianto, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M.Si

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku

dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu” Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Lathif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP., M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Nina Yuslimi, S.IP., M.Si Sebagai Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di gunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada Pegawai Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, Dan juga kepada pengelola kawasan wisata alam air terjun tembulun beserta masyarakat atau pengunjung yang telah bersedia membantu memberikan informasi untuk melengkapi data dan memberikan kelancaran penulis dalam melakukan Skripsi.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 27 Agustus 2020

Penulis

Ttd

Sopiah Ranti
NPM 157310398

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACK.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Pemerintahan.....	18
2. Konsep Organisasi Pemerintahan.....	19
3. Konsep Kebijakan Publik.....	21
4. Konsep Implementasi Kebijakan.....	22
5. Konsep Kepariwisataaan.....	26
6. Konsep Peranan.....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	41
C. Kerangka Pikir.....	43
D. Konsep Operasional.....	43
E. Operasional Variabel.....	47
F. Teknik Pengukuran.....	48
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Populasi dan Sampel.....	53

D. Teknik Penarikan Sampel.....	54
E. Jenis dan Sumber Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data	56
G. Teknik Analisis Data.....	58
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	59
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu.....	60
1. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu	60
2. Visi dan Misi	63
B. Profil Dispora Indragiri Hulu	64
C. Struktur Organisasi Dispora Indragiri Hulu	67
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	69
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	71
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	72
B. Hasil dan Pembahasan dari Indikator Variabel Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	73
1. Komunikasi	74
2. Sumber Daya.....	80
3. Disposisi.....	86
4. Struktur Birokrasi.....	90
C. Rekapitulasi dari Hasil Penelitian yang Berjudul Implementasi Kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Inhu.....	94
D. Faktor-Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan dalam Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Tembulun.....	97
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Data Kunjungan Wisatawan Kelokasi Kawasan Objek Wisata Air Terjun Tembulun Desa Pejangki, Kec Batang Cenaku	14
II.1	: Penelitian Terdahulu Implementasi Kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Inhu	42
II.2	: Operasonali Variabel Peneltian Tentang Implementasi Kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Inhu	47
III.1	: Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Inhu	54
III.2	: Jadwal Waktu Penelitian Implementasi Kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Inhu	59
IV.1	: Nama Ibu Kota Kecamatan dan Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019	62
IV.2	: Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu	64
V.1	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Responden Masyarakat	70
V.2	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Responden Masyarakat	71
V.3	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Responden Masyarakat	72
V.4	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pertama (Komunikasi)	75
V.5	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pertama (Sumber Daya)	82
V.6	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pertama (Disposisi)	87
V.7	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pertama (Struktur Birokrasi)	91
V.8	: Rekapitulasi Hasil Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Inhu	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.I	: Kerangka piki tentang Implementasi Kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Inhu	47
IV.1	: Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kueisioner Pengunjung Objek Wisata Terkait Dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	104
2 : Daftar Kuesioner Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Terkait Dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	110
3 : Daftar Wawancara Pengelola Objek Wisata Air Terjun Tembulun Terkait Dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	114
5 : Rekap Telly Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	117
6 : Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	120
7 : Dokumentasi Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau terkait dengan judul Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	125
8 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu Terkait Judul Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	126
9 : Surat Balasan dari Kantor Camat Lirik Desa Banjar Balam Terkait Judul Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	128

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sopiah Ranti
NPM : 157310398
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Agustus 2020
Pelaku Pernyataan,



Sopiah Ranti

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABSTRAK

Oleh
Sopiah Ranti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Dalam mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Tembulun. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan tugas dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan tempat-tempat pariwisata baik itu dari segi tingkat keamanan, kenyamanan, fasilitas, wahana, agar wisatawan tertarik untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu salah satunya adalah Air Terjun Tembulun. Indikator penilaian pelaksanaan tugas yang dipergunakan meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Terdapat tiga kelompok populasi dan sampel penelitian ini yaitu pegawai Kantor Kabupaten Indragiri Hulu, berjumlah 2 orang, dan pengelola lokasi objek wisata air terjun tembulun, berjumlah 3 orang dan juga masyarakat pengunjung air terjun tembulun berjumlah 30 orang. Besaran sampel yang ditetapkan dari ketiga kelompok populasi ini adalah 2, 3 dan 16 orang. Dua teknik sampling yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik sensus untuk populasi pegawai dan pengelola pariwisata, dan teknik purposive sampling untuk masyarakat yang ada disekitar tempat wisata. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini penulis menilai dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Mengembangkan berada pada interval penilaian “Cukup Terlaksana”.

Kata Kunci : Pelaksanaan Tugas, Pengembangan Wisata.

***Policy Implementation Of Regional Regulation Number 4 Year 2018
Concerning Tourism Development In Indragiri Hulu District***

Abstract

***By
Sopiah Ranti***

This study aims to determine the Implementation of the Duties of the Sports and Tourism Youth Office and the Culture of Indragiri Hulu Regency in developing Tembulun Waterfall Tourism Object. The problem raised in this study is about the implementation of the tasks of the Youth and Sports and Tourism and Culture Office in developing tourism places both in terms of safety, comfort, facilities, rides, so that tourists are interested in visiting tourist attractions in Indragiri Regency Hulu one of them is Tembulun Waterfall. The performance assessment indicators used include communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The type of research that is located in Indragiri Hulu Regency is a descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the location under study. There are three population groups and the sample of this research are employees of Indragiri Hulu Regency Office, amounting to 2 people, and manager of the location of Tembulun waterfall tourism objects, amounting to 3 people and also people who visit Tembulun waterfall totaling 30 people. The sample size determined from these three population groups is 2, 3 and 16 people. The two sampling techniques used in determining individual samples are the census technique for the employee population and tourism management, and the purposive sampling technique for the community that is around the tourist sites. Types and data collection techniques used consist of, primary data collected using questionnaire and interview techniques and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on this analysis technique, the writer assesses and concludes that the Implementation of the Task of the Department of Youth Sports and Tourism and Culture of Indragiri Hulu Regency in Developing is at the interval of the assessment of "Quite Done".

Keywords: Task Implementation, Tourism Development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, untuk mencapai tujuan Negara tersebut di perlukan pemerintah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atau Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tuuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Salah satu sektor penting pembangunan di indonesia adalah pembangunan di bidang pariwisata. Dalam era globalisasi saat ini, sektor pariwisata merupakan industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global, pariwisata telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai negara. Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan

perekonomian bangsa-bangsa di dunia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju.

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata, berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya.

Mata rantai yang kegiatannya yang terkait dengan industri pariwisata tersebut mampu menghasilkan devisa dan dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja, dengan adanya perkembangan industri pariwisata di suatu wilayah, arus urbanisasi kota-kota besar dapat lebih ditahan, hal ini disebabkan pariwisata memiliki tiga aspek yaitu aspek ekonomi (sumber devisa, pajak-pajak), Aspek sosial (penciptaan lapangan kerja) dan aspek budaya. Keberadaan sektor pariwisata tersebut memperoleh dukungan dari semua pihak seperti pemerintah daerah sebagai pengelola, masyarakat yang berada di lokasi objek wisata serta partisipasi pihak swasta sebagai pengembang.

Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah, pariwisata biasanya memberikan jasa hiburan bagi pengunjung atau mewujudkan rasa ingin tahu akan tempat-

tempat yang belum pernah dikunjungi, sehingga orang rela mengeluarkan uang banyak dan rela pergi ke berbagai tempat yang jauh.

Banyak negara yang bergantung besar akan industri pariwisata, yaitu sebagai sumber pajak dan pendapatan bagi perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Industri pariwisata sendiri merupakan industri yang menjanjikan tapi juga merupakan industri musiman. Ketika musim liburan tahunan tiba maka setiap tempat wisata ramai dikunjungi oleh pengunjung, namun pada saat hari lain tempat wisata menjadi sepi pengunjung. Industri pariwisata juga membuat industri-industri lain berkembang pesat seperti jasa perhotelan, barang seni khas daerah asal wisata, kuliner, dan lain sebagainya.

Dengan demikian industri pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata, karena dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal.

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional, sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi, untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini, salah satu

kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Salah satu objek wisata yang penulis akan bahas pada penelitian ini adalah pengembangan objek wisata air terjun di Kabupaten Indragiri Hulu, dimana program pengembangan pariwisata di daerah ini merupakan program yang sasarannya mengarah pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur budaya dan pariwisata, program tersebut merupakan program pemerintah daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata, perlu dilakukan pemantauan atau evaluasi untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan program dalam pembangunan kepariwisataan nasional, evaluasi dapat memberikan informasi tidak hanya mengenai perkembangan inputs dan output pelaksanaan program, tetapi juga meliputi hasil, manfaat dan dampak serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan potensi pariwisata.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah, Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata, memang masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah salah satunya adalah pengembangan wisata yang berada pada sektor lokal, atau wisata-wisata kecil yang memerlukan sentuhan awal Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Salah satu kabupaten yang memiliki objek wisata dan berpotensi bagi daerahnya yang ada di Provinsi Riau adalah Kabupaten Indragiri Hulu. dimana salah satu tujuan objek wisata yang selama ini belum begitu diketahui oleh masyarakat luas adalah Objek wisata Air Terjun Tembulun. Air terjun ini merupakan objek wisata alam yang memiliki panorama yang indah yang memiliki keunggulan karena posisinya yang strategis dan tidak begitu jauh dari ibukota dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Air terjun tembulun terletak di Desa Pejangki, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Keberadaan objek wisata alam ini masih belum sepenuhnya populer dikalangan masyarakat riau, hal ini diperkuat dari data yang penulis dapatkan dari beberapa sumber yang ternyata tidak memasukkan air terjun tembulun dalam destinasi wisata yang mereka sebutkan, dimana pemberitaan yang penulis dapatkan dari media internet disebutkan Peta Wisata Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) atau tempat menarik di Indragiri Hulu antara lain adalah :

1. Istana Indragiri
2. Tugu Julang
3. Mesjid Raya Pauh Peranap
4. Taman Beringin
5. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
6. Komplek Makam Raja Indragiri
7. Sungai Batang Gansal
8. Danau Raja

9. Suku Talang Mamak
10. Danau Menduyan
11. Mesjid Raya Rengat
12. Danau Batang Pahit

Sementara itu, keberadaan objek wisata alam seperti Air Terjun Tembulun masih belum diperhitungkan, dan jika di lihat dari kunjungan masyarakat lokal di daerah tersebut, air terjun tembulun bisa dikatakan cukup ramai pengunjung disetiap minggunya.

Beberapa objek wisata air terjun yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Air Terjun Denalo adalah salah satu objek wisata alam yang sangat menarik. Terletak di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku.
2. Air Terjun Tangga Raja di Kecamatan Batang Cenaku.
3. Air Terjun Tembulun Berasap adalah sebuah destinasi wisata alam yang sangat menarik dan masih terasa asri. Terletak di Area PT. Arvena, Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku.
4. Air Terjun Air Itam di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku.
5. Air Terjun Sultan Limbayang di Kecamatan Batang Gansal.
6. Air Terjun Tualang di Desa Rantau Langsung, Kecamatan Batang Gansal.
7. Air Terjun Granit di Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Air terjun tersebut terbentuk dari hasil penambangan batu granit dimana

sebelumnya terdapat aliran sungai yang terputus akibat proses penambangan yang menyisakan lubang besar dan membentuk air terjun.

8. Air Terjun Papunauan di Dusun Lemang, Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal.
9. Air Terjun Bukit Aseng di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida. bahwa Air Terjun Aseng ini berganti nama menjadi Air Terjun Siambul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu dapat diuraikan Struktur sebagai berikut ini

- a. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang;
 2. Pengkoordinasian program kerja masing-masing seksi;
 3. Pengkoordinasian para kepala seksi dilingkungan Pemasaran Pariwisata;
 4. Penilaian prestasi kerja bawahan;
 5. Pengordinasian pembinaan penyusunan dan penetapan pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 2. Pengkoordinasian program kerja masing-masing seksi;
 3. Pengkoordinasian para kepala seksi dilingkungan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 4. Penilaian prestasi kerja bawahan;

5. Pengordinasian pembinaan penyusunan dan penetapan pengembangan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 6. Pengordinasian penyusunan rencana kerja dan penetapan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 7. Pelaksanaan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 8. Pelaksanaan study pengkajian pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
1. Menyusun rencana kerja seksi pengembangan sdm dan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 2. Memberi petunjuk pada bawahan;
 3. Menyusun rencana pengembangan sdm dan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 4. Melaksanakan pendataan dan identifikasi pengembangan sdm dan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan SDM dan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 6. Melaksanakan pemutakhiran inventarisasi pengembangan sdm dan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 7. Melaksanakan pengembangan SDM dan hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- d. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD);
1. Pelaksanaan tugas dinas sesuai bidang operionalnya
 2. Pelaksanaan urusan administarsi teknis opsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu diatas,

dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berwenang untuk mengurus bidan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu adalah Pemerintah bidang Dinas Pariwisata Indragiri Hulu. Dengan demikian, seharusnya pihak-pihak yang bertanggungjawab dan memiliki peran dalam pengembangan pariwisata memberikan perhatian yang lebih terhadap pariwisata yang memiliki potensi, dimana perhatian yang dimaksud bisa dalam bentuk baik itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap wisatawan yang akan berkunjung seperti infrastruktur.

Berdasarkan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 di jelaskan mengenai visi dan misi serta tujuan dan dan strategis yaitu :

“Visi merupakan pernyataan dan cita - cita yang ingin dicapai dan diwujudkan dimasa yang akan datang dan merupakan arah pembangunan dibidang pemuda olahraga dan pariwisata. Visi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 - 2021 yakni "*Terwujudnya Pemuda yang mandiri, Olahraga yang tangguh, Pariwisata Yang Berdaya Saing dan berkelanjutan Menuju Indragiri Hulu Yang Lebih Sejahtera Tahun 2021*".

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Mewujudkan insan pemuda yang unggul, terampil dan mandiri
2. Mewujudkan pemuda sebagai pelopor dan penggerak pembangunan dibidang pemuda

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani
4. Mewujudkan insan olahraga yang berprestasi, mampu bersaing dan sejahtera
5. Mengembangkan daerah tujuan wisata yang kreatif, inovatif, mempesona dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan PDRB kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan daya tarik pariwisata yang kompetitif pada tingkat nasional dan internasional
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia (SDM) regulasi kepariwisataan

Selain dari tugas dan fungsi serta visi misi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Dan Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, dinas tersebut menyusun tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam mewujudkan segala rencana untuk mencapai visi misi yang telah disebutkan diatas, dimana adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan
 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi dan Industri Pariwisata;
 2. Memasarkan destinasi dan Industri pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab serta yang intensi inovatif dan interaktif;
 3. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien
- b. Sasaran
 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi dan Industri Pariwisata dengan Sararana Strategis
 2. Memasarkan destinasi dan Industri pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien,

dan bertanggungjawab serta yang intensi inovatif dan interaktif dengan Sararana Strategis

3. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien dengan Sararana Strategis

c. Strategis

1. Meningkatkan dan Mengembangkan kawasan Ekowisata Alam, kawasan pariwisata Pendidikan dan Sejarah, kawasan pariwisata Belanja dan Kuliner Kreatif, kawasan pariwisata Warisan Budaya, kawasan pariwisata budaya tradisional, kawasan pariwisata Konvensi dan Olahraga;
2. Mengembangkan jalur wisata tematik yang menghubungkan kawasan pariwisata Daerah dengan kawasan pariwisata di sekitarnya;
3. Mengembangkan program wisata kreatif, edukatif dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan dan jumlah kunjungan di masa rendah kunjungan;
4. Mengembangkan program wisata kreatif pada daya tarik wisata tradisional, industri kreatif dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mengembangkan program wisata edukatif pada daya tarik wisata alam perkotaan yang mampu meningkatkan kontribusi wisatawan dan penduduk Daerah terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Indragiri Hulu;
6. Mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif pada daya tarik wisata warisan budaya yang mampu meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta berkontribusi pada pelestarian bangunan warisan atau bangunan cagar budaya;
7. Mengembangkan fasilitas akomodasi kelas bintang, daya tarik wisata dan fasilitas rekreasi;

8. Mengembangkan identitas usaha pariwisata Daerah yang kreatif melalui penciptaan suasana khas Daerah dan pelayanan kreatif kepada konsumen;
9. Meningkatkan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
10. Mengembangkan program kemitraan berkinerja tinggi antara industri kreatif masyarakat dengan usaha pariwisata Daerah;
11. Menerapkan konsep pemasaran bertanggung jawab dan diarahkan oleh masyarakat pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun usaha pariwisata;
12. Mengembangkan pasar pariwisata Daerah diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi;
13. Menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Daerah selama 5 (lima) tahun;
14. Mengembangkan pemasaran terpadu dengan sektor lain, khususnya perdagangan dan investasi;
15. Mengembangkan pemasaran terpadu dengan Kabupaten Se Propinsi Riau, Provinsi Riau dan Nasional untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas;
16. Mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni, sejarah serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program pemasaran;
17. Menggiatkan kelompok penggerak pariwisata pada kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata

Meskipun Indragiri Hulu memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. ada

banyak permasalahan yang ditemui, dimana keberadaan/letak dari objek wisata tidak diketahui oleh masyarakat dan wisatawan.

Air Terjun Tembulun Berasap adalah sebuah destinasi wisata alam yang sangat menarik dan masih terasa asri, Terletak di area PT. Arvena, yang bertepatan di Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Air terjun tembulun berasap diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2016 oleh Kepala Bidang Pariwisata Disporabudsata Indragiri Hulu yang dihadiri oleh masyarakat lokal, komunitas off road/ motor trail, dan kelompok lainnya.

Masyarakat desa pejangki sebenarnya sudah lama mengetahui air terjun ini, hanya saja akses jalan menuju lokasi yang cukup sulit membuat warga belum sempat mempromosikannya secara massal. Dinas pariwisata sendiri telah berencana untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana, khususnya pembangunan jalan menuju air terjun tembulun berasap ini.

Di lokasi wisata ini tidak hanya terdapat 1 air terjun, hingga kini ada 5 air terjun dengan ketinggian yang bervariasi yang telah dipublikasikan oleh masyarakat setempat, semuanya memiliki nama “Tembulun” dan akan dijadikan sebagai saah satu destinasi wisata alam unggulan kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, air terjun ini dikelilingi oleh hutan yang masih terasa asri. Hal tersebut membuat wisata ini layak dikunjungi oleh semua kalangan mengisi waktu libur.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari kantor Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2019, jumlah kunjungan resmi yang dilaporkan ke pihak pemerintah khususnya di kawasan objek wisata Air Terjun Tembulun, Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku memiliki memiliki jumlah bervariasi setelah di resmikan pada tahun 2016

lalu, dimana untuk melihat data tersebut, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

Table 1.1. Data Kunjungan Wisatawan Kelokasi Kawasan Objek Wisata Air Terjun Tembulun Desa Pejangki, Kec Batang Cenaku.

No	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan		Keterangan
1	2016	813	Orang	Periode Satu Tahun
2	2017	1.102	Orang	Periode Satu Tahun
3	2018	1.34	Orang	Periode Satu Tahun
4	2019	349	Orang	Periode Agustus 2019

Sumber : *Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020*

Berdasarkan jumlah data kunjungan yang telah penulis sajikan diatas, dapat dilihat bahwa angka kunjungan wisatawan yang tercatat mengunjungi air terjun tembulun masih tergolong sangat kecil, hal ini sangat disayangkan apabila melihat kondisi objek wisata yang memang memiliki potensi sangat baik, sementara itu untuk perbandingan yang dapat dilakukan adalah, dimana pada tahun 2019, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Indragiri Hulu dikatakan oleh pihak Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu meningkat tajam khususnya kunjungan wisatawan di Objek wisata Danau Raja, dimana pada tahun 2019 di adakan kegiatan-kegiatan yang menarik minat pengunjung sehingga angka kunjungan meningkat tajam dari tahun 2018 yang hanya berjumlah sebanyak 14.000 wisatawan, sangat berbeda dengan tahun 2019 yang total kunjungan berjumlah sebanyak 38.278 orang wisatawan telah berkunjung ke objek wisata Danau Raja.

Peningkatan kunjungan wisatawan yang terjadi di kawasan objek wisata Danau Raja tentunya tidak terlepas dari promosi dan kegiatan yang di adakan dikawasan tersebut, sehingga masyarakat yang berkunjung memiliki obsi lain sebagai hiburan selain dari danau itu sendiri, hal inilah yang seharusnya dilakukan di kawasan objek wisata air tembulun, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan yang sangat kecil adalah kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal perbaikan fasilitas dan pengadaan kegiatan even-even yang dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung menikmati keindahan kasawan objek wisata air terjun tersebut.

Berdasarkan pembahasan dan penyajian beberapa data yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi fenomena masalah dalam penelitian ini dan mendasari penulis mengangkat judul ini sebagai penelitian, dimana fenomena-fenomena tersebut adalah berikut ini:

1. Berdasarkan hasil Observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan permasalahan bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang data ke kawasan Objek Wisata Air Terjun Tembulun di Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku masih sangat sedikit, hal ini tentunya sangat disayangkan jika melihat potensi objek wisata air terjun tersebut yang memang sangat baik.
2. Fenomena yang terjadi dilapangan adalah kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Pemuda Olahraga Dan Periwisata Da Kebudayaan dalam memperbaiki atau membangun fasilitas sarana dan prasarana pendukung seperti infrastruktur jalan untuk memudahkan wisatawan dalam berkunjung.

3. Tidak tersedianya fasilitas umum dilokasi Air Terjun memberikan rasa kurang nyaman kepada pengunjung, sehingga hal ini di duga dapat mengurangi minat wisatawan untuk datang berkunjung ke lokasi tersebut, beberapa fasilitas yang belum tersedia adalah kamar mandi umum yang layak, toilet umum yang layak, musholah, jalan yang layak, dan beberapa fasilitas lainnya.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu”.

B. Perumusan Masalah

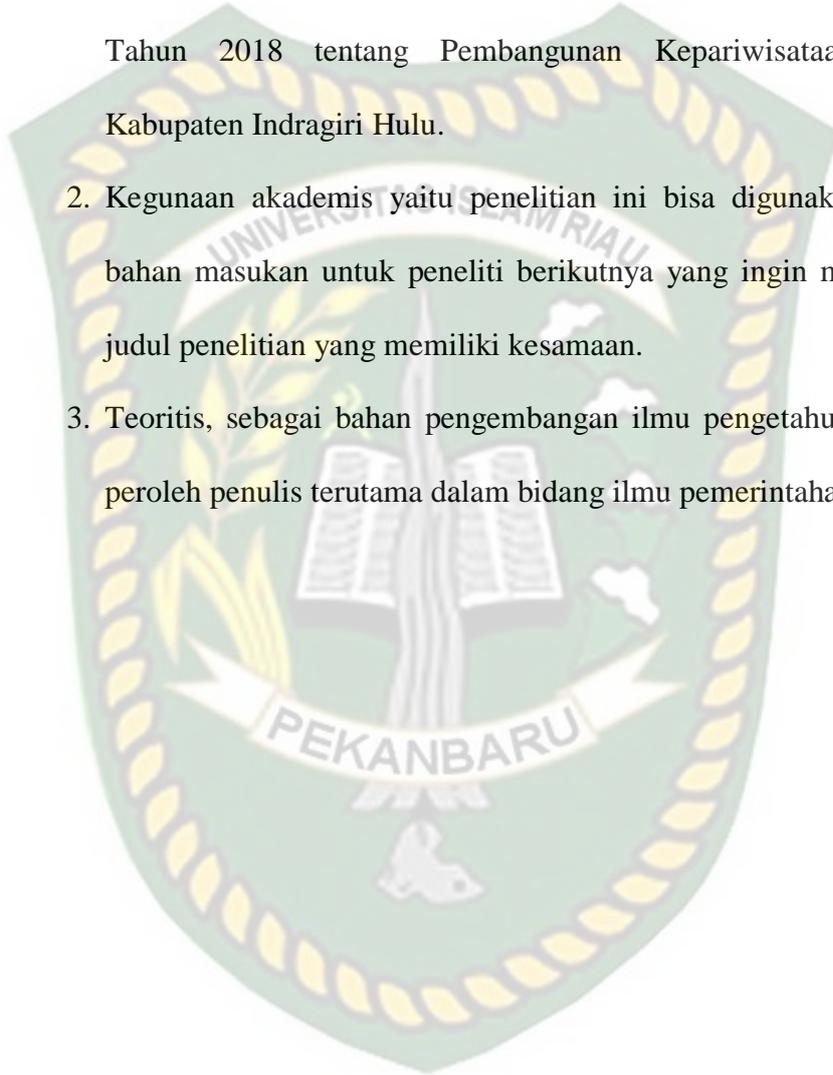
Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu”?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
 2. Untuk mengetahui penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Kegunaan penelitian:

1. Praktis, dapat di jadikan bahan informasi bagi siapa saja yang ingin mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti berikutnya yang ingin mengangkat judul penelitian yang memiliki kesamaan.
3. Teoritis, sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang di peroleh penulis terutama dalam bidang ilmu pemerintahan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa konsep teori yang di perlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai titik tolak ukur pada permasalahan. Adapun pengertian teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur Dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara Dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya suatu negara untuk mencapai tujuannya. (Musaneff , 1992 : 8).

Menurut (Admosudirdjo1989:183),Management Pemerintahan adalah management yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*governmental act*) yakni misalnya managemen daripada *government staff work*, *management* kepolisian, management daripada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan(Nugroho, 2003. 36).

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Yusri Munaf (2016;47) menyatakan bahwa pemerintahan dalam paradigma lama memiliki material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaksud sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara

2. Organisasi Pemerintahan.

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan

tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha

Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini

dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat.

3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Sedangkan menurut Nugroho (dalam Zulfikar, 2013 : 24) Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Dalam Indihono, 2009:17)

Kemudian menurut Ndraha (dalam Agus, 2014 : 25) Kebijakan pemerintahan merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan. Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Selanjutnya menurut Mustoadidjadja (dalam Nurcholis 2005: 263) memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang di maksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Konsep Impelementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Meter dan Horn (dalam Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dibawah ini:
 - a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
 - b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan

sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi:

“SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-

sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.”

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

5. Konsep Kepariwisataaan

Untuk dapat lebih mudah dalam memahami status kepariwisataan dalam pengembangannya sesuai dengan perubahan zaman yang selalu terjadi, maka dalam kepariwisataan perlu terlebih dahulu dipahami tentang pengertian dari kepariwisataan itu sendiri.

Kepariwisataan menurut UU Nomor 9 tahun 1990 adalah:

Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang di lakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek daya tarik wisata. Unsur terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencari nafkah, tetapi apabila disela-sela kegiatan mencari nafkah itu, ia juga secara khusus melakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dapat di anggap sebagai kegiatan wisata.

Spillance (2001;3) juga mengatakan bahwa pariwisata adalah seluruh fenomena dari hubungan yang muncul antara wisatawan, pengusaha, pemerintah

dan masyarakat daerah tujuan wisata, dalam rangka menarik para wisatawan atau pengunjung lain untuk tinggal di tempat wisata.

Mc Intosh dan Gupta sebagaimana di terjemahkan oleh Pandit (2004;30) menjelaskan bahwa :Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah dan masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta pengunjung lainnya.

Dari beberapa pengertian pariwisata di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pariwisata adalah sesuatu perjalanan yang dalam jangka waktu tertentu melakukan perjalanan dengan sukarela yang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok, karena ketertarikan dari tempat objek wisatanya.

Yang di maksud dengan turis atau wisatawan adalah setiap orang yang memenuhi 2 kondisi yaitu :

- a) Orang tersebut tidak sedang berada di tempat kediamannya selama waktu tertentu yang relative singkat.
- b) Uang yang di belanjakan selama tidak berada di tempat kediamannya adalah uang yang di bawa dari tempat kediamannya yang bukan uang yang di peroleh di tempat tujuan yang di kunjunginya (Ogilvie dalam Marpaung, 2002;20).

Marpaung (2002;217) mengemukakan objek di wisata adalah segala sesuatu yang berupa dan berasal dari alam dan budaya masyarakat serta potensi ekonomi yang dapat di tawarkan untuk menarik minat wisata.

Dan objek wisata itu sendiri menurut Ngapena (2003;27) adalah “segala objek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi wisatawan untuk dapat

mengunjunginya. Misalnya keadaan alam, bangunan bersejarah, kebudayaan dan pusat-pusat rekreasi modern”.

Kemudian menurut Pendit (1990;29) ada 10 unsur pokok dalam industri pariwisata yaitu :

1. Politik pemerintah terhadap kunjungan wisatawan. Sikap pemerintah ini dapat berpengaruh langsung terhadap kunjungan wisatawan maupun tidak langsung berpengaruh. Seperti situasi dan kondisi yang stabil dalam perkembangan politik, ekonomi serta keamanan dalam negara itu sendiri.
2. Perasaan ingin tau. Manusia pada hakikatnya serba ingin mengetahui segala sesuatu dalam hidupnya, baik di dalam maupun di luar lingkungannya. Ia ingin tau tentang kebudayaan, cara hidup, adat-istiadat, cuaca dan hawa yang berbeda, keindahan dan keajaiban alam yang tidak dalam lingkungannya sendiri.
3. Sifat ramah-tamah. Hasil penelitian dan peninjauan PATA (*Pasific Ares Travel Associaton*) yang berkantor pusat di San Francisco California menyatakan bahwa rakyat Indonesia memiliki kebudayaan yang tinggi dan anggun dan merupakan bangsa yang sangat ramah.
4. Jarak, dan Waktu. Kelancaran, kecepatan dan ketepatan transportasi dapat mengurangi jarak yang harus di tempuh dan waktu yang di gunakan wisatawan relatif lebih cepat.
5. Atraksi. Segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk di kunjungi dan di lihat.
6. Akomodasi. Rumah sementara bagi wisatawan yang mengharapkan kenyamanan, keenakan, pelayanan yang baik, kebersihan yang menjamin, kesehatan serta hal-hal kebutuhan hidup sehari-hari yang layak dalam pergaulan internasional.
7. Pengangkutan. Lalu lintas yang lancar, kondisi jalan yang baik, alat-alat angkut yang nyaman. Yang terpenting adalah ketepatan rencana jadwal perjalanan serta keteraturan jadwal.

8. Harga-harga. Wisatawan luar negeri maupun domestic pada umumnya bukanlah orang yang kaya raya, karena itu mereka ingin segala sesuatunya berharga murah. Menurut penelitian Patterson, ratio wisatawan laki-laki dan perempuan adalah 3:4, ini berarti wisatawan wanita lebih banyak dibandingkan dengan wisatawan laki-laki dan pada umumnya wisatawan wanita dalam berbelanja ingin semua barang yang lebih baik dan berharga lebih murah.
9. Publisitas dan Promosi. Kampanye atau propaganda kepariwisataan yang di dasarkan atas program yang teratur dan berkelanjutan baik ke masyarakat domestik untuk mendapatkan dukungan maupun masyarakat internasional.
10. Kesempatan Berbelanja. Kesempatan untuk membeli barang oleh-oleh atau souvenir untuk di bawa pulang ke rumah. Menurut hasil penelitian yang di lakukan oleh Harry G. Clement, uang yang di pergunakan oleh seseorang wisatawan untuk membeli oleh-oleh rata-rata berkisar 25%-26,3% dari jumlah ongkos-ongkos pembayaran akomodasi, transportasi lokal dan makan minum.

Dalam UU Nomor 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, pasal 4 menyebutkan bahwa objek wisata dan daya tarik wisata terdiri dari :

- a) Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna.
- b) Objek dan daya tarik wisata budaya yang merupakan hasil karya manusia yang berwujud museum peninggalan sejarah, taman rekreasi dan tempat hiburan.
- c) Objek dan daya tarik wisata minat khusus seperti mendaki gunung, berburu, industri kerajinan, tempat perbelanjaan, dan sungai air deras.

Dengan adanya organisasi yang berupa Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, seni dan budaya dalam mengelola kepariwisataan, maka di harapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan objek wisata, sehingga dapat menarik

minat wisatawan yang berada di daerah maupun wisatawan yang berasal dari luar daerah. Dalam usaha untuk mengembangkan objek wisata tersebut perlu di dukung oleh berbagai macam strategi yang perlu di lakukan antara lain :

a) Sarana dan Prasarana

Suwantoro (2007;22) mengatakan bahwa Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang di perlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.

Selanjutnya sarana kepariwisataan menurut Yoeti (1996;10) di bedakan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Sarana pokok kepariwisataan (*Main Touring Superstructure*). Adalah perusahaan-perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung pada lalu lintas wisatawan dan travelers lainnya. Fungsinya untuk menyediakan fasilitas pokok yang dapat memberikan pelayanan bagi kepentingan wisatawan. Yang termasuk dalam sarana pokok kepariwisataan adalah agen perjalanan, transportasi pariwisata, tempat penginapan dan sebagainya.
2. Sarana pelengkap kepariwisataan (*Supplementing Tourism superstructure*). Adalah fasilitas yang dapat melengkapi sarana pokok sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat membuat wisatawan lebih lama tinggal di tempat objek wisata tersebut. Yang termasuk sarana pelengkap ini adalah tempat olah raga seperti lapangan golf, kolam renang, tempat fitness dan lain-lain.
3. Sarana penunjang kepariwisataan (*Supporting Tourism Superstructure*). Adalah fasilitas-fasilitas yang di perlukan wisatawan yang tidak hanya melengkapi sarana pokok dan pelengkap saja, tapi fungsinya yang lebih penting agar wisatawan lebih banyak membelanjakan uangnya. Yang termasuk dalam sarana penunjang ini antara lain, klab malam, kasino, toko cendramata, bioskop dan lain-lain.

Dengan adanya sarana kepariwisataan, di harapkan objek pariwisata yang ada di daerah dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya dan tinggal dalam jangka waktu tertentu. Serta dapat menikmati pelayanan yang memuaskan dari pihak pengelola pariwisata.

Sedangkan prasarana menurut Kreck (dalam Yoeti 1996;188) di bagi menjadi dua, yaitu :

1. Prasarana Prekonomian (*Economic Infrastructure*) yang dapat di bagi atas :
 - a. Pengangkutan (*Transportation*)
 - b. Praasarana komunikasi (*Communication infrastructure*)
 - c. Kelompok yang termasuk “*UTILITIES*” : Listrik, air minum, system irigasi dan sumber energy.
 - d. Sistem perbankan.
2. Prasarana Sosial (*Social Infrastructure*) yang di maksud sarana prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelangsungan prasarana prekonomian yang ada.

Antara sarana dan prasarana kepariwisataan tentu saja saling menunjang dan saling terkait guna meningkatkan mutu objek wisata dan kualitas pelayanan kepariwisataan dalam melayani wisatawan yang datang, sehingga wisatawan dapat merasakan kepuasan dalam pelayanan yang di berikan.

b) Produk yang di tawarkan

Menurut Yoeti (1996;15) mengatakan bahwa Industri pariwisata adalah “kumpulan dari macam-macam perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang di perlukan wisatawan pada khususnya dan traveler pada umumnya, selama dalam perjalanan”.

Selanjutnya Suwanto (1997;49) mengatakan bahwa produk wisata adalah keseluruhan pelayanan yang di peroleh dan di rasakan atau di nikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya, sampai ke daerah tujuan wisata yang telah di pilihnya dan kembali ke rumah dimana ia berangkat semula.

Kemudian Medlin dan Meddleton dalam Yoeti (1996;164) mengatakan bahwa produk Industri pariwisata adalah semua jasa-jasa yang di butuhkan wisatawan semenjak ia berangkat dari tempat tinggalnya sampai di daerah tujuan wisata yang telah di pilihnya sampai ia kembali ke rumah tempat tinggalnya.

Dengan adanya produk pariwisata yang di tawarkan di daerah objek pariwisata maka semua wisatawan yang merasa kepuasan dan tidak merasakan kekecewaan dalam perjalanan wisatanya.

c) **Promosi/Memperkenalkan Objek Wisata**

Menurut Yoeti (1996;186) pada dasarnya promosi adalah intuk memberitahu, membujuk atau mengingatkan lebih khusus lagi, tujuannya untuk mempengaruhi melalui komunikasi agar mereka terpikirkan untuk melakukan sesuatu. Marpaung dan Bahar (2002;103) mengatakan bahwa promosi adalah : “suatu upaya yang di lakukan untuk menyesuaikan produk pariwisata dengan permintaan wisatawan sehingga produk menjadi lebih menarik.

Selanjutnya Menurut Yoeti (1996;188) alat promosi ada 3 macam yaitu:

- a. *Advertising*. Acara yang tepat untuk memberitahu hasil produk kepada calon konsumen yang masih belum kenal. Keuntungannya dapat menjangkau banyak orang melalui media massa seperti: surat kabar, majalah, radio, televisi dan bioskop.

- b. *Sales Support*. Bantuan pada penjual dengan memberikan semua materi promosi yang di rencanakan untuk di berikan kepada umum, seperti : brosur, poster dinding, guide book, folder dan sebagainya.
- c. *Public Relations*. Mempunyai tugas memelihara hubungan dunia luar perusahaan, memberi informassi yang di perlukan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas informasi yang di berikan dan perusahaan dapat menunjukkan hubungan sosial yang baik di lingkungan masyarakat. Bentuk *public relations* yaitu : membagi-bagi berita, konferensi pers, menjernihkan dan menyelesaikan persoalan yang ada.

d) Kemampuan sumber daya manusia.

Nawawi (2003;40) mengatakan bahwa: sumber daya manusia adalah “potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis yang dapat di wujudkan menjadi potensi yang nyata (*Real*), secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang baik dapat mewujudkan pertama-tama dan terutama di tentukan oleh kapasitas yang di miliki oleh manusia pelaksananya. Demikian juga dalam menyelenggaraan kepariwisataan yang hanya dapat berjalan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya.

Pentingnya peranan manusia sebagai pelaksana di sebabkan karena manusia merupakan unsur dinamis organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kualifikasi

mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya akan melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi pelaksanaan pariwisata.

e) Penataan tata ruang

Penataan dalam hal ini diharapkan dapat mengembangkan semaksimal mungkin kemampuan objek wisata. Sehingga keindahannya dapat tercipta dan dinikmati oleh wisatawan. Kebanyakan objek wisata yang kurang diminati oleh wisatawan, dikarenakan oleh pihak pengelola objek wisata yang bersangkutan tidak memperhatikan penataan tata ruangnya. Oleh sebab itu, penataan tata ruang objek wisata patut untuk diperhatikan dengan maksimal, agar tidak menjenuhkan, akan tetapi memiliki suasana yang menyegarkan, menarik dan dapat mengurangi beban yang ada serta dapat melahirkan inspirasi yang baru dan baik bagi setiap wisatawan yang datang.

Menurut UU No. 9 tahun 1990 penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan:

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antara bangsa.
3. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
4. Meningkatkan mendataan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
5. Mendorong mendayagunakan produksi nasional.

f) Pengembangan Pariwisata

Pengembangan itu sendiri tidak terlepas di dalamnya suatu upaya atau usaha pengembangan dari objek yang sudah dibangun. Karenanya pengembangan akan dapat di mengerti apabila kita akan memahami arti dari pembangunan itu

sendiri. Keberhasilan pengembangan di tentukan oleh tiga faktor sebagaimana di kemukakan oleh Yoeti (1996;303)

Ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan yaitu tersedianya objek dan daya tarik wisata, adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata, terjadinya fasilitas adminties yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi pengembangan pariwisata yang di maksud adalah usaha-usaha yang di lakukan dalam meningkatkan mutu pelayanan, sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik pariwisata guna mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal ini, Yoeti (1996;1970) mengemukakan bahwa : sarana pariwisata adalah perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik langsung maupun tidak langsungdan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan.

Pengembangan kepariwisataan dewasa ini secara sadar telah di giatkan di sebagian negara-negara di dunia. Pemerintah di negara-negara secara langsung maupun tidak langsung membina sektor kepariwisataan tersebut mengingat pengembangan sektor kepariwisataan saling berhubungan dan mempengaruhi sektor-sektor lainnya, pengembangan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri dan manfaat maksimalnya hanya di capai bila pertumbuhan selaras dengan usaha pemeliharaan dan pengembangan sektor lainnya.

Untuk mencapai hal tersebut maka perlu pengembangan konsep pariwisata yang tepat. Konsep pariwisata yang tepat menurut Marpaung dan Herman

(2002:38) adalah pariwisata yang secara aktif membantu dalam menjaga keabadian suatu daerah kebudayaan sejarah dan alam.

Yoeti dalam bukunya pengantar ilmu pariwisata, mengemukakan, berhasilnya pengembangan industri pariwisata di tentukan oleh :

- a. Tersedianya objek dan atraksi wisata yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang yang mengunjungi suatu daerah wisata.
- b. Adanya *fasilitas Accesbility* yaitu sarana dan prasarana dengan segala fasilitasnya, sehingga memungkinkan para wisatawan dan mengunjungi daerah wisata tersebut.
- c. Tersedianya fasilitas *Aminutes* yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan selama perjalanan wisata di lakukan. (Oka A, Yoeti. 1996)

Sedangkan menurut Kunarjo (1996:7) perencanaan adalah penyiapan seperangkat keputusan untuk di laksanakan pada waktu yang akan datang, yang di arahkan pada pencapaian sasaran. Dengan definisi tersebut, maka perencanaan mempunyai unsur-unsur:

- a. Berhubungan dengan hari depan.
- b. Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis dan
- c. Di rancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Lebih lanjut ia mengatakan, perencanaan yang baik memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Di dasari dengan tujuan pembangunan.
- b. Konsistensi dengan realitas.
- c. Pengawasan dan kontinu.
- d. Mencakup aspek fisik dan pembiayaan.
- e. Memahami berbagai ciri hubungan antara variable dan
- f. Mempunyai koordinasi yang baik.

Menurut Cooper dkk dalam Sunaryo (2013: 159) menjelaskan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Obyek daya tarik wisata (*Attraction*) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/artificial.
2. Aksesibilitas (*Accessibility*) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi.
3. Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata.
4. Fasilitas umum (*Ancillary Service*) yang mendukung kegiatan pariwisata.
5. Kelembagaan (*Institutions*) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.

Selanjutnya menurut Suwanto (2004:56) bahwa terdapat beberapa kebijaksanaan dalam pengembangan pariwisata yang lebih dikenal dengan kebijaksanaan pengembangan pariwisata antara lain:

- a. Promosi
Promosi pada hakekatnya merupakan pelaksanaan upaya pemasaran, promosi pariwisata perlu dilakukan secara selaras dan terpadu baik di dalam negeri maupun di luar negeri
- b. Aksebilitas
Aksebilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung pengembangan pariwisata, karena menyangkut pengembangan lintas sektoral
- c. Kawasan pariwisata
Pengembangan kawasan pariwisata dimaksudkan untuk:
 1. Meningkatkan peran serta daerah dan swasta dalam pengembangan pariwisata
 2. Memperbesar dampak positif pembangunan
 3. Mempermudah pengendalian terhadap dampak lingkungan

d. Produk wisata

Upaya untuk dapat menampilkan produk wisata yang bervariasi dan mempunyai kualitas daya saing yang tinggi

e. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia merupakan salah satu modal dasar pengembangan pariwisata, sumberdaya manusia ini harus memiliki keahlian dan ketrampilan yang di perlukan untuk layanan pengembangan pariwisata

f. Kampanye Nasional sadar wisata

Pada hakekatnya adalah upaya memasyarakatkan kegiatan pengembangan pariwisata yang ada.

6. Konsep Peranan

Peranan menurut Poerwadarminta (1995:751) adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat tersebut, peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dia mengatakan bahwa “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:243).

Menurut Komarudin (1994:768) dalam buku “ensiklopedia manajemen“ mengungkap sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Peranan berasal dari kata *peran*. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pengertian diatas, di ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu tingkatan kedudukan atau tugas utama yang harus dilaksanakan yang dilakukan oleh manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan dari :

1. Obyeknya sudah ada akan tetapi masih belum sempurna maka akan dijadikan sempurna, atau yang sedikit dijadikan menjadi banyak, diluaskan atau di perindah.
2. Obyeknya sudah sempurna di pelihara terus menerus untuk diwariskan pada generasi yang akan datang.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009:212).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan di definisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Sukanto dalam Rauf (2001 ; 269) menjelaskan bahwa peranan dianggap penting karena ia mengatur perilaku seseorang pada batasan-batasan tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain serta mengatakan bahwa peranan mencakup pada tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting struktur sosial masyarakat.

Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seorang karena kewajiban dari jabatan atau pekerjaannya. Dalam peran yang berhubungan dengan pekerjaannya seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaannya. Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seseorang camat juga mempunyai peran membina perangkat desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai seorang pemimpin harus mengambil langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas yang akan diambil dalam membina perangkat kepenghuluan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini penulis mengambil dari beberapa jurnal untuk menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mohammad Jibrani. Jurnal Program Studi Pendidikan Geografi. Tahun 2016	Potensi Pengembangan Daya Tarik Wisata Di Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi	Persamaan penelitian yang sedang penulis kerjakan dengan penelitian pada jurnal ini adalah pembahasan tentang pengembangan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah.	Adapun perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini ada pada tata letak lokasi penelitian, waktu penelitian dan hasil penelitian yang memberikan gambaran berbeda.
2	Sri Rahayu Budiani, dan Windarti Wahdani. Jurnal Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada, Indonesia.	Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas Di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah.	Persamaan penelitian yang sedang penulis kerjakan dengan penelitian pada jurnal ini adalah pembahasan tentang pengembangan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah.	Perbedaan terhadap penelitian terdahulu tentunya dari segi jenis penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan sistem dua variabel sementara penulis satu variabel.
3	Soedarso, Muchammad Nurif, Windiani. Jurnal Sosial Humanivora, Vol 7 No.2, November Tahun 2014.	Potensi Dan Kendala Pengembangan Pariwisata Berbasis Kekayaan Alam Dengan Pendekatan Marketing Places. (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bojonegoro)	Persamaan penelitian yang sedang penulis kerjakan dengan penelitian pada jurnal ini adalah pembahasan tentang pengembangan wisata yang dilakukan oleh Pemerintah.	Hasil penelitian tentunya akan berbeda dengan penelitian yang penulis kerjakan saat ini, hal ini karena metode penelitian yang dilakukan juga berbeda dan tujuan penelitian ada perbedaan juga.

Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2020*

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.I : Kerangka Pikir tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2020

D. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisa, maka penulis akan memberikan batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan ketertiban sosial yang berpedoman pada teori-teori yang digunakan dan disesuaikan dengan konsep yang ada pada daerah penelitian serta masalah yang akan diteliti.

1. Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur Dinas, berhubungan dengan

keserasian kedalam dan hubungan antara Dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya suatu negara untuk mencapai tujuannya.

2. Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.
3. Kebijakan pemerintahan merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan. Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.
4. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.
5. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang di lakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek daya tarik wisata. Unsur terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencari nafkah, tetapi apabila

disela-sela kegiatan mencari nafkah itu, ia juga secara khusus melakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dapat di anggap sebagai kegiatan wisata.

6. Peranan adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat tersebut, peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan.
7. Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
 - a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
 - b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2. Operasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Penilaian
1	2	3	4	5
Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi	Pelaksanaan Tugas Dinas.	1. Komunikasi (<i>Comunication</i>)	a. Perencanaan Program Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Tembulun. b. Pelaksanaan Sosialisasi Keunggulan Objek Wisata Air Terjun Tembulun.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana
		2. Sumber Daya (<i>Resources</i>)	a. Menjadikan Kawasan Air Terjun Tembulun kedalam prioritas pengembangan wisata. b. Menyediakan Sumber Daya Anggaran Dalam Upaya Pengembangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana
		3. Disposisi (<i>Disposition</i>)	a. Program pengembangan Potensi Kawasan Wisata Air Terjun Tembulun di Lakukan Secara Berkelanjutan. b. Kemauan Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Air Terjun Tembulun.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana
		4. Struktur Birokrasi (<i>Bereucratic Structure</i>)	a. Koordinasi Pemerintah Dengan Masyarakat Setempat Dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Tembulun. b. Menyediakan Bidang Khusus Dalam Menjalankan Tugas Di Bidang Pengembangan Pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Kurang Terlaksana

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2020*

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan terhadap variabel dan indikator penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu” Untuk mendapatkan hasil konversi data responden maka peneliti merumuskan analisis Sekala Likert, menggunakan teori Hartono (2006:30). Sekala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yaitu, penilaian dilakukan pengelompokan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu: Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana, sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap Penelitian Tentang *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu* berada pada skala pengukuran persentase pada kategori 66 % - 100 %

Cukup Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap Penelitian yang sedang penulis kerjakan yaitu *Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu* berada pada skala pengukuran persentase pada kategori 34% - 65 %

Kurang Terlaksana : Apabila jawaban responden terhadap Penelitian Tentang *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu* berada pada skala pengukuran persentase pada kategori 0% - 33%

a. Komunikasi (*Comunication*)

Terlaksana : Apabila ke 3 item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Komunikasi (*Comunication*)” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 66% - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Komunikasi (*Comunication*)” mendapatkan jawaban dari responden berada pada skor 34% - 65%.

Kurang Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Komunikasi (*Comunication*)” mendapatkan jawaban dari responden berada pada skor 0% - 33%.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Terlaksana : Apabila ke 3 item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Sumber Daya (*Resources*)” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 66% - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Sumber Daya (*Resources*)” mendapatkan jawaban dari responden berada pada skor 34% - 65%.

Kurang Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Sumber Daya (*Resources*)” mendapatkan jawaban dari responden berada pada skor 0% - 33%.

c. Disposisi (*Disposition*)

Terlaksana : Apabila ke 3 item penilaian yang menjadi dasar penilaian dalam menjalankan proses penelitian pada indikator “Disposisi (*Disposition*)” dapat dilaksanakan atau jumlah jawaban responden berada pada skor 66% - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila ke 3 item penilaian yang menjadi dasar penilaian dalam menjalankan proses penelitian pada indikator “Disposisi (*Disposition*)” dapat dilaksanakan atau jumlah jawaban responden berada pada skor 34% - 65%.

Kurang Terlaksana : Apabila ke 3 item penilaian yang menjadi dasar penilaian dalam menjalankan proses penelitian pada indikator “Disposisi (*Disposition*)” dapat dilaksanakan atau jumlah jawaban responden berada pada skor 0% - 33%.

d. Struktur Birokrasi (*Bereucratic Structure*)

Terlaksana : Apabila ke 3 item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Struktur Birokrasi (*Bereucratic Structure*)” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 66% - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Struktur Birokrasi (*Bereucratic Structure*)” mendapatkan jawaban dari responden berada pada skor 34% - 65%.

Kurang Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “Struktur Birokrasi (*Bereucratic Structure*)” mendapatkan jawaban dari responden berada pada skor 0% - 33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya. Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. (Sugiono, 2016;63).

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi penelitian kombinasi (Mixed Methods) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. Sugiyono (2011:404).

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten dan Kebudayaan Indragiri Hulu, kemudian penulis melakukan penelitian dilokasi air terjun tembulun yang terletak di Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku, dan adapun alasan penulis melakukan penelitian dilokasi ini dikarenakan masih kurangnya perhatian pihak Dinas Pemuda Olahraga dan

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Dalam mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Tembulun

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi,2012;254). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Seksi Pengembangan Dan Promosi Pariwisata.
3. Pengelola Lokasi Objek Wisata Air Terjun Tembulun.
4. Masyarakat / Pengunjung Air Terjun Tembulun.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representatif (mewakili) permasalahan atau pembahasan yang sedang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar sampel yang dipilih dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap. Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel III. 1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

No	Populasi	Jumlah (Orang)		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan	1	1	100%
2	Kepala Desa Pajengki, Kecamatan Batang Cenaku.	1	1	100%
3	Penjaga Pintu Masuk Objek Wisata Air Terjun Tembulun	1	1	100%
4	Masyarakat / Pengunjung Air Terjun Tembulun	~	35	100%
Jumlah		~	38	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun cara penarikan sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel untuk aparatur atau responden yang berasal dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan dan juga Pengelola Lokasi Objek Wisata Air Terjun Tembulun adalah *teknik sensus* atau disebut juga sebagai *sampling jenuh* (*sensus*), menurut Sugiyono (2014:118) Teknik *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka dari itu, penulis memilih sampel menggunakan teknik *sampling jenuh* karena jumlah populasi yang relatif kecil.

Sementara itu, untuk populasi masyarakat, penentuan sampel yang akan diteliti adalah menggunakan teknik *Purposive Sampling*, Menurut Arikunto (2006:76) pengertian dari *Purposive Sampling* adalah jenis teknik yang

mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata nya, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Sementara itu Sugiyono (2010:119) menjelaskan bahwa pengertiannya *Purposive Sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden
- b. Tanggapan responden terhadap Kuesioner yang penulis tanyakan kepada sampel yang berhubungan dengan penelitian penulis tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, dan adapun data yang diperlukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah yang berkaitan dengan:

- a. Sejarah singkat mengenai Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu Dan Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku.
- c. Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata.
- d. Dokumentasi Penelitian baik di Kantor Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dan Kebudayaan atau Dokumentasi dengan Masyarakat di Lapangan.

F. Tehnik pengumpulan data

Dalam usaha memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis berhubungan langsung dengan pihak-pihak berwenang yang memberikan informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

1. Kuisisioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2005:162). Dalam penelitian ini, responden yang diberikan kuisisioner adalah Masyarakat yang menjadi pengunjung di lokasi objek wisata air terjun tembulun. Adapun pertanyaan yang diberikan melalui kuisisioner berkaitan langsung dengan indikator variabel penelitian.

2. Observasi

Teknik Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2013: 64) melalui observasi peneliti belajar

tentang perilaku terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian yaitu lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian seperti kondisi sesungguhnya objek wisata air terjun tembulun. adapun data yang dapat penulis pelajari dan ambil dari pelaksanaan observasi adalah menyajikan data terkait fakta yang terjadi dilapangan.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 82) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu dokumentasi dapat berupa tulisan ataupun berita media online, dokumentasi eksternal berisi bahan-bahan informasi berupa buku, jurnal ilmiah, data internet berkaitan yang membantu penelitian.

4. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat serta mendalam. Dan kemudian, teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau orang-orang atau responden yang di jadikan sampel dan dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang

diteliti oleh peneliti. Menurut (Moleong, 2005:186) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan beserta beberapa key informan yang penulis jadikan responden. Adapun langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan.
- Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- Mengawali atau membuka wawancara.
- Melangsungkan alur wawancara.
- Mengonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- Menuliskan hasil wawancara.
- Identifikasi tindak lanjut hasil wawancara

G. Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian Teknik Kuantitatif dan Teknik Kualitatif atau biasa disebut dengan metode penelitian campuran (*mixed methods*), dimana menurut pendapat sugiyono (2011:404) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara penelitian metode kualitatif dan metode kuantitatif untuk

digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif. Selain hal tersebut, penulis juga melakukan analisis pada penelitian ini, dimana teknik analisa ini juga suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian.

H. Jadwal waktu penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

N O	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																											
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																								
2	Ujian UP								■																				
3	Revisi UP												■																
4	Kuisisioner												■																
5	Rekom survay												■																
6	Survay Lapangan												■																
7	Analisis data																■												
8	Penyusunan Laporan Hasil																■												
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				■								
10	Ujian Konferehensif																								■				
11	Revisi Skripsi																											■	
12	Pengandaan Skripsi																												■

Sumber : Olahan Data Penulis Tahun 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

1. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dan Diralisi denan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri. Kabupaten Indragiri Hulu pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri. Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing- masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru. Dengan dibentuknya Provinsi Riau denan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah didua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royon Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR pusat. Berdasarkan

undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan kecamatan , sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :
 1. Kec. Rengat Ibu Kota Rengat
 2. Kec. Pasir Penyuh Ibu Kota Air Molek
 3. Kec. Seberida Ibu Kota Pangkalan Kasai
 4. Kec. Peranap Ibu Kota Peranap
 5. Kec. Kuantan Hilir Ibu Kota Baserah
 6. Kec. Kuantan Tengah Ibu Kota Taluk Kuantan
 7. Kec. Kuantan Mudik Ibu Kota Lubuk Jambi
 8. Kec. Singingi Ibu Kota Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyuh, dan Renat, Kecamatan Yang baru adalah :

1. Kec. Benai ibukota Benai
2. Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
3. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan :

1. Kec. Rengat ibukota Rengat
2. Kec. Rengat Barat, ibukota Pematang Reba

3. Kec. Seberida, ibukota Pangkalan Kasai
4. Kec. Batang Gansal, ibukota Seberida
5. Kec. Batang Cenaku, ibukota Aur Cina
6. Kec. Pasir Penyu, ibukota Air Molek
7. Kec. Lirik, ibukota Lirik
8. Kec. Kelayang, ibukota Simpan Kelayang
9. Kecamatan Peranap ibukota Peranap
10. Kec. Batang Peranap, ibukota Pematang
11. Kec. Rakit Kulim, ibukota Petonggan
12. Kec. Sungai Lala, ibukota Kelawat
13. Kec. Lubuk Batu Jaya, ibukota Lubuk Batu Tinggal
14. Kec. Kuala cenaku, ibukota kuala cenaku

Untuk lebih jelasnya penulis akan mamaparkan nama nama kecamatan beserta ibu kotanya yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.1: Nama Ibu Kota Kecamatan dan Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten (Km)
1	Peranap	Peranap	92
2	Batang Peranap	Selunak	96
3	Seberida	Pangkalan Kasai	35
4	Batang Gansal	Seberida	65
5	Batang Cenaku	Aur Cina	61
6	Kelayang	Simpang Kelayang	65
7	Rakit Kulim	Petonggan	85
8	Pasir penyu	Air Molek	45
9	Lirik	Lirik	40
10	Sungai Lala	Kelawat	55
11	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggal	74
12	Rengat Barat	Pematang Reba	15
13	Rengat	Rengat	0
14	Kuala Cenaku	Kuala Cenaku	20

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hulu

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu yang maju, mandiri sejahtera, berbudaya dan agamis tahun 2020.

b. Misi

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh kekuatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menguasai IPTEK.
2. Memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah yang berpijak pada nilai-nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahankan identitas dan integritas Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya.
4. Mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian (Agroindustri) dengan mengembangkan industri turunan yang berorientasi pada pasar lokal dan ekspor.
5. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur yang mampu membuka isolasi daerah, mengembangkan potensi daerah, mengembangkan kawasan-kawasan produktif, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi serta membuka peluang pasar.
6. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, penataan kelembagaan pemerintahan daerah serta penataan perangkat hukum dan perundang-undangan.

B. Profil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi pariwisata, seni maupun budaya serta masih ada potensi daerah lainnya yang masih terpendam dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Sebagian potensi tersebut sudah layak jual sebagai objek wisata, seni maupun budaya yang mempunyai peluang untuk menarik pengunjung yang meminatinya. Beberapa objek wisata yang sudah layak jual misalnya ada TNBT, Danau Raja, Danau Meduyan, selain itu juga terdapat situs cagar budaya taman makam raja Indragiri dan masih banyak lagi yang masih belum diketahui oleh kebanyakan orang. Disamping itu, Kabupaten Indragiri Hulu juga memiliki potensi kepemudaan dan keolahragaan yang apabila pemanfaatannya dioptimalkan, akan menjadi modal dan kekuatan pendukung bagi pembangunan daerah. Berikut ini adalah data pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Budaya dan Pariwisata.

Tabel 4.2: Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	4
2	S1	20
3	DIII	2
4	DII	1
5	SMA/STM	15
6	SMP/MTS	1
7	SD	-
Jumlah		43

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata Indragiri Hulu, Tahun 2020

Dari tabel 4.2 tersebut diatas dapat kita lihat bahwa pegawai yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Budaya dan Pariwisata masih minim sekali dan

masih ada lulusan SMA/STM . sehingga membuat promosi objek wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu kurang optimal. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu bertanggungjawab atas pengembangan dan pemasaran kebudayaan objek wisata Kabupaten Indragiri Hulu yang berupaya memenuhi tuntutan persaingan dan terus mengikuti perkembangan dalam berbagai bidang.

Dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu ini, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu memberikan wewenang kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Budaya dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tupoksi
Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata berdasarkan azas Otonomi dan pembantuan.
2. Fungsi
 - a. Perumusan kebijakan dibidang Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata serta pelayanan umum.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

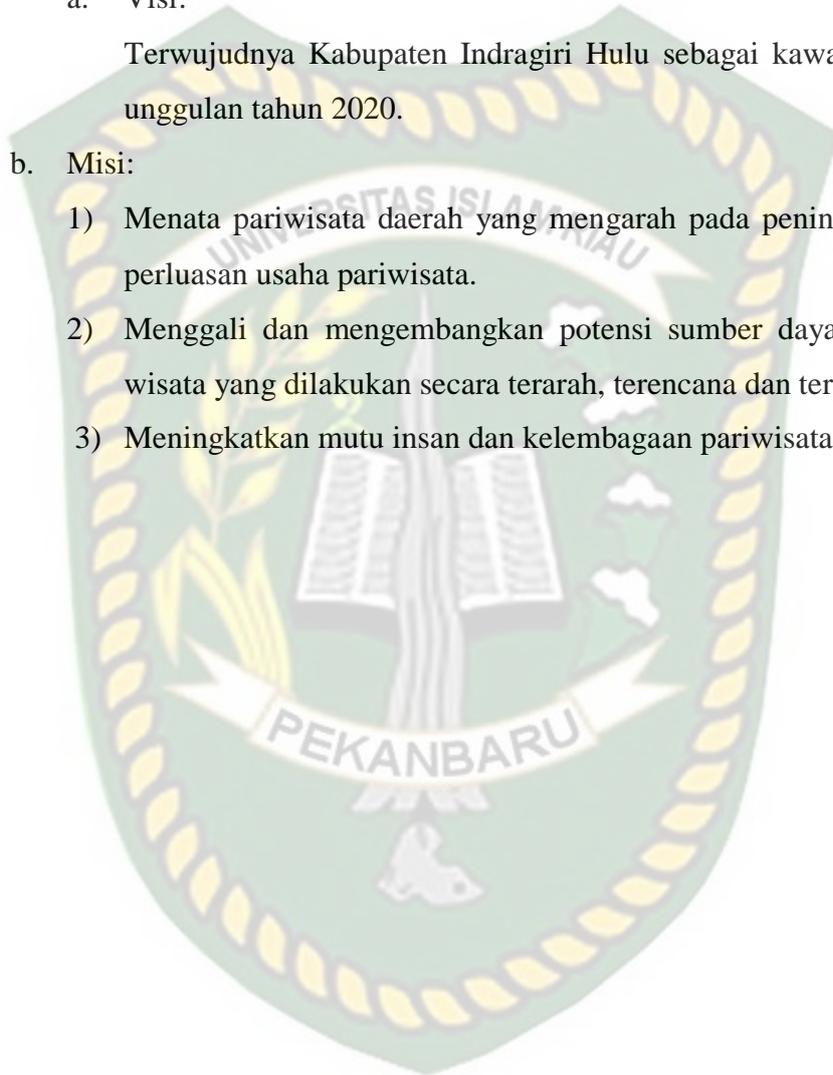
3. Visi dan Misi

a. Visi:

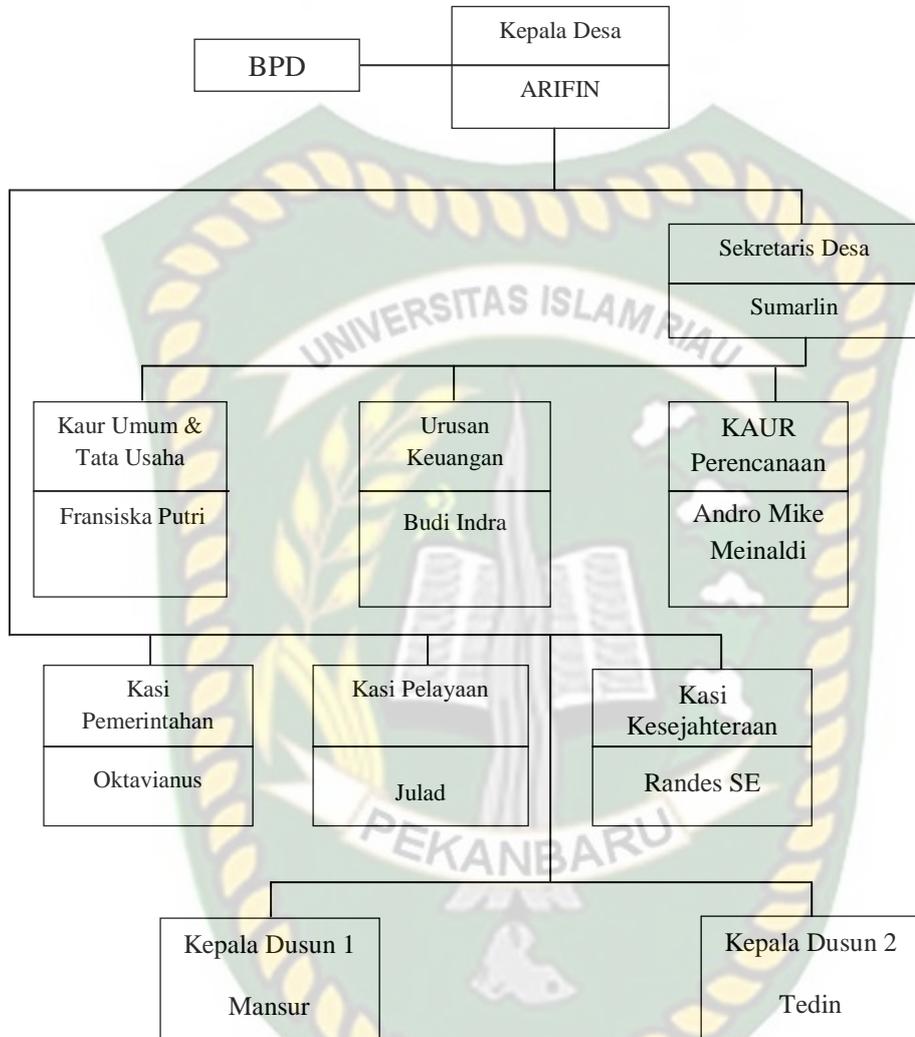
Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kawasan wisata unggulan tahun 2020.

b. Misi:

- 1) Menata pariwisata daerah yang mengarah pada peningkatan dan perluasan usaha pariwisata.
- 2) Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan wisata yang dilakukan secara terarah, terencana dan terpadu.
- 3) Meningkatkan mutu insan dan kelembagaan pariwisata.



Gambar IV.2: Bagan Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku.



Sumber : Kantor Pemerintahan Desa Pejangki, Tahun 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, jadi data-data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari Masyarakat atau Pengunjung Air Terjun Tembulun yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Selaian itu penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan, Seksi Pengembangan dan Promosi Pengembangan dan Promosi Wisata Air Terjun. Hal ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi ataupun jawaban dari masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Sehubungan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Tembulun, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Identitas ini berguna untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu mengetahui status dari masyarakat tersebut dan mengenali objek yang menjadi responden dalam penelitian ini. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas reponden:

I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, penulis perlu mengetahui identitas dari masyarakat yang akan penulis mintai jawaban, yang dimulai dari jenis kelamin. Untuk mengetahui identitas responden masyarakat, maka penulis akan memaparkan dengan menggunakan tabel. Hal ini untuk mempermudah penulis untuk mengolah data yang telah didapatkan di lapangan. Berikut berupa tabel di bawah ini:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Responden Masyarakat.

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	18	42%
2	Perempuan	17	48%
Jumlah		35	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2020

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas Pelaksanaan Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Tembulun adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 18 orang (42%) dari Total keseluruhan responden mencapai 35 Orang responden, dan jumlah responden masyarakat perempuan berjumlah 17 orang (48%) dari total keseluruhan responden masyarakat yang diteliti. Persentase diatas tentunya menggambarkan bahwa responden yang penulis temui dilapangan lebih di dominasi oleh responden masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti. Usia sangat mempengaruhi cara berfikir seseorang, semakin dewasa usia seseorang maka cara berfikirnya pun sudah berbeda, sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk, sudah bisa memberikan pendapat akan suatu objek yang akan dinilai, termasuk dalam penelitian ini, penulis akan menanyakan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu terhadap mengembangkan objek wisata air terjun tembulun. Berikut identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usiapada tabel berikut ini:

Tabel V.2: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Responden Masyarakat.

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	12	34%
2	31-40 Tahun	18	52%
3	41-50 Tahun	5	14%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		35	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2020

Dari tabel V.2 diatas dapat dinyatakan bahwa responden dari masyarakat baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 31-40 Tahun sebanyak 18 orang (52%), masyarakat yang memiliki usia 20-30

Tahun sebanyak 12 orang (34%) dan 41-50 Tahun sebanyak 5 orang (14%), dan tidak ada responden yang berada pada usia >50 Tahun dari 35 orang jumlah masyarakat yang dijadikan sebagai responden.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Responden Masyarakat.

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	1	3%
2	SMP	3	9%
3	SMA	17	49%
4	Diploma	4	11%
5	Sarjana S1/S2	10	28%
Jumlah		35	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2020

Dari tabel V.3 di atas dinyatakan bahwa responden dari masyarakat baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling dominan memiliki pendidikan pada kategori “SMA” dengan jumlah responden 17 orang (49%), selanjutnya untuk pendidikan masyarakat pada kategori “Sarjana” yaitu sebanyak 10 orang (28%) selanjutnya responden yang memiliki pendidikan Diploma berjumlah 4 orang (11%), dan untuk masyarakat yang memiliki pendidikan SMP

berjumlah 3 orang (9%), dan yang paling minim adalah responden yang memiliki pendidikan SD yaitu berjumlah 1 orang (3%). Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa dominannya responden masyarakat memiliki latar belakang pendidikan SMA dan Sarjana, hal ini tentunya dapat menggambarkan bahwa di Indragiri Hulu memiliki masyarakat yang berpendidikan cukup baik.

B. Hasil Dan Pembahasan Indikator Variabel Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang tampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (Pasolong, 2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dalam Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Tembulun. Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini adalah: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi.

Dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indikator Komunikasi, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelasan-penjelasan yang didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kebudayaan. Berikut hasil penelitian penulis yang disajikan dalam bentuk tabel:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Menurut Edward III (2008: 90-92) keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Di dalam penelitian ini yang menjadi implementornya atau pelaksana dalam mengembangkan pariwisata di daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kebudayaan dengan berbagai strategi yang digunakan agar pariwisata yang ada dapat berkembang dan bisa menjadi pemasukkan daerah. Jadi keuntungan yang didapat tidak hanya pada masyarakatnya saja tetapi juga pada pendapatan daerah yang semakin meningkat.

Di dalam indikator ini ada tiga poin penilaian sebagai pendukung indikator pertama ini yaitu, Perencanaan Program Pengembangan Objek Wisata Air Terjun, Pelaksanaan Sosialisasi Keunggulan Objek Wisata Air Terjun Tembulun, Sumber Informasi yang Didapatkan oleh Masyarakat Terkait Wisata Air Terjun Tembulun, dan disetiap poin akan dinilai dalam kategori Terlaksana (T), Cukup Terlaksana (CT), Kurang Terlaksana (KT) dan berikut adalah penyajiannya:

Tabel V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pertama (Komunikasi)

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Perencanaan Program Pengembangan Objek Wisata Air Terjun	6 (17%)	20 (57%)	9 (26%)	35 (100%)
2	Pelaksanaan Sosialisasi Keunggulan Objek Wisata Air Terjun Tembulun	10 (29%)	14 (40%)	11 (31%)	35 (100%)
3	Sumber Informasi yang Didapatkan oleh Masyarakat Terkait Wisata Air Terjun Tembulun	8 (23%)	16 (46%)	11 (31%)	35 (100%)
Jumlah		24	50	31	105
Rata-Rata		8	17	10	35
Persentase		23%	49%	29%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2020

Berdasarkan hasil kuisioner yang dipaparkan dalam bentuk tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban paling dominan yang diberikan oleh masyarakat adalah berada pada kategori “Cukup Terlaksana” yaitu rata-rata 17 orang dengan persentasenya adalah 49%, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pernah mendapatkan sosialisasi terkait wisata-wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, tetapi pelaksanaan sosialisasi tersebut hanya dilaksanakan di awal-awal wisata tersebut di resmikan atau di perkenalkan oleh Pemerintah Daerah, setelah selesai proses promosi tersebut, maka sampai saat ini masyarakat mengaku bahwa mereka tidak pernah lagi menerima atau mendengar adanya proses promosi terkait wisata yang ada di daerah mereka yang mana dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya hasil yang penulis dapatkan di lapangan sesuai dengan penyebaran kuesioner jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang dijadikan sebagai responden adalah pada kategori “Kurang Terlaksana” yaitu rata-rata 10 orang dengan persentase 29%, adapun alasan yang diberikan oleh responden terkait dengan jawaban tersebut adalah dikarenakan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di anggap tidak secara menyeluruh, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi baik dari pemerintahan itu langsung ataupun mendapatkan informasi dari sumber sumber lainnya baik itu melalui website resmi dari pemerintah maupun dari media sosial yang memaparkan perkembangan wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan demikian maka masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan penyampaian informasi yang dibahas pada indikator diatas masih kurang terlaksana.

Adapun jawaban terakhir yang penulis dapatkan dari responden masyarakat adalah jawaban dengan kategori “Terlaksana”, dimana jumlah masyarakat yang memberikan jawaban ini adalah sebanyak 8 orang dengan persentase 23% dari keseluruhan jumlah responden itu sendiri, jawaban tersebut menandakan masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaan penyampaian informasi tentang adanya objek wisata di Desa Pajengki, Kecamatan Batang Cenaku telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Pemerintah Daerah, baik Desa maupun Kabupaten melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan.

Selain mendapatkan jawaban dari proses penyebaran kuesioner seperti yang telah disajikan diatas, penulis juga telah melakukan proses penelitian dilapangan dengan mewawancarai beberapa informan yang dianggap berkaitan dengan proses penelitian penulis, dimana salah satunya adalah perwakilan dari

Dinas Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, dimana dalam hal ini, yang memberikan informasi kepada penulis adalah Bapak H. Syahrudin, S.Sos., MT selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, adapun informasi yang diberikan oleh beliau ketika penulis wawancara adalah tentang pembahasan indikator yang pertama yaitu penyampaian informasi dan perencanaan program-program kerja terkait pengembangan pariwisata di Indragiri Hulu, dan hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Secara keseluruhan, sebelum adanya permasalahan tentang wabah pandemic atau Covid19 saat ini, kita telah beberapa kali melakukan pembahasan-pembahasan tentang pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, mulai dari Danau Raja, Pacu Jalur, hingga Air Terjun yang ada di daerah Indragiri Hulu itu sendiri, kita selalu menyampaikan kepada media bahwa di Daerah ini ada banyak destinasi wisata, silahkan datang, akan kita sambut, hal ini dilakukan sebelum adanya Covid19, tetapi untuk saat ini, kita belum bisa menjalankan program-program kita khususnya tentang promosi dan pengadaan festival atau acara yang bertujuan untuk mengumpulkan massa, karna hal tersebut akan sangat beresiko, tetapi dapat saya pastikan bahwa pelaksanaannya akan terus kita pacu sampai nantinya dimulai lagi setelah masalah pandemic ini berakhir” (Wawancara, 9 Juni 2020, Bapak H. Syahrudin, S.Sos., MT selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat memberikan penjelasan analisis bahwa untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum dapat melaksanakan program-program kerja mereka karena permasalahan Covid19, tetapi diluar hal tersebut, sebelum terjadinya masalah pandemic Covid19, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu telah berupaya melakukan promosi-

promosi dengan memuat pemberitaan di portal-portal berita online hingga seminar-seminar khusus yang memuat materi tentang pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu, dimana salah satunya adalah Air Terjun Tembulun.

Selain hasil wawancara diatas, penulis juga melakukan observasi lanjutan dengan mendatangi pihak Pemerintah Desa selaku pelaksana roda Pemerintahan di Desa Pajengki, Kecamatan Batang Cenaku, adapun tujuan dari observasi yang penulis lakukan ke kantor Desa Pajengki adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan aparat Desa terkait dengan pengembangan Objek Wisata Air Terjun Tembulun di Desa Pejangki itu sendiri, dan adapun hasil yang penulis dapatkan dimana salah satunya dengan melakukan wawancara dengan Bapak Arifin, S.Sos selaku Sekretaris Desa adalah sebagai berikut:

“Secara khusus kita tidak ada program untuk hal tersebut, karna memang hal ini berkaitan dengan anggaran yang tersedia, tetapi secara umum, kita akan tetap membantu perkembangan objek wisata air terjun tembulun dengan perbaikan infrastruktur di Desa Pejangki ini sendiri, salah satunya adalah penyediaan akses jalur menuju lokasi dengan melakukan semenisasi jalan, dan fasilitas lainnya di lapangan, untuk kedepannya tentunya kita akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata agar bisa memberikan perhatian dan anggaran untuk perkembangan objek wisata di Desa Pejangki”
(Wawancara, 10 Juni 2020, Bapak Arifin, S.Sos selaku Sekretaris Desa Pejangki)

Hasil observasi yang penulis dapatkan dari kantor Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku adalah dimana permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Tembulun yaitu permasalahan tentang keterbatasan dana yang dimiliki, dimana selama ini Pemerintah Desa tidak memiliki program khusus yang di alokasikan untuk

mengembangkan objek wisata di Desa Pejangki itu sendiri, adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan objek wisata air terjun tersebut adalah dengan melakukan pembangunan terhadap akses jalan menuju ke lokasi Objek Wisata Air Terjun Tembulun.

Selain hal tersebut, untuk menemukan jawaban yang paling realistis dan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dilapangan, penulis juga melakukan wawancara terhadap petugas penjaga objek wisata air terjun tembulun itu sendiri, dimana dalam hal ini informan yang memberikan informasi kepada penulis adalah Bapak Putra Hermansyah, yang sehari-harinya bekerja selaku penjual atau penjaga pintu masuk ke lokasi objek wisata air terjun tembulun, adapun hal yang penulis wawancarai bersama beliau adalah terkait dengan bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola tempat wisata air terjun tembulun agar masyarakat luar mau datang dan mengetahui adanya objek wisata tersebut, jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Saya sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi secara langsung, karna objek wisata ini memang diketahui masyarakat luas melalui informasi dari mulut ke mulut, itu yang membuat lokasi ini dikenal orang banyak, mungkin beberapa kali ada orang yang datang khusus untuk mengambil gambar foto dan video lalu disebar di media sosial, lalu muda-mudi yang melakukan foto dan menyebarkannya melalui media sosial pribadi mereka, sehingga teman-temannya tertarik juga untuk berkunjung kemari, saya kira hal-hal tersebut juga lah yang membantu perkembangan dari Objek wisata air terjun tembulun” (Wawancara, 10 Juni 2020, Bapak Putra Hermansyah, Penjaga Objek Wisata Air Terjun Tembulun)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, khususnya di lokasi objek wisata air terjun tembulun itu sendiri, penulis menemukan fakta

bahwa memang untuk saat ini kondisi dari lokasi objek wisata air terjun tembulun memang sangat sepi, selain dari kondisi bencana covid19 yang menyerang Negara Indonesia, faktor lain yang menyebabkan sepi nya kunjungan wisatawan ke lokasi air terjun adalah karena kurang lengkapnya fasilitas yang tersedia dilokasi, dimana salah satu fasilitas yang dianggap sangat penting adalah kamar mandi dan juga kamar ganti yang membedakan antara wanita dan laki-laki, ini menjadi salah satu hal yang harus dibenahi.

Dengan demikian, maka hasil penelitian yang didapatkan pada pembahasan yang pertama yaitu tentang Komunikasi, dimana setelah dilakukan penelitian dengan beberapa metode yang berbeda, baik itu penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi, maka penulis mendapatkan fakta yang dapat dijadikan kesimpulan yaitu proses Sosialisasi belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan informasi-informasi yang kurang terkait dengan keberadaan dan informasi terkait dengan akses menuju ke lokasi Air Terjun Tembulun, khususnya informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan juga oleh pengelola setempat, justru adapun informasi yang di dapatkan di media sosial ataupun internet, informasi tersebut di kelola oleh orang-orang yang memang bukan dari instansi resmi, melainkan dari blogger ataupun pegiat media sosial.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur kehidupan tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik, sumber daya yang dapat berubah, baik makin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Menurut Edward III (2008: 90-92) bahwa sumber daya sangat penting dalam faktor

keberhasilan suatu pelaksanaan suatu tugas karna walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, tugas tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud manusia, yakni kompetensi implementator/pelaksana, dan sumberdaya finansial yaitu berupa anggaran. Sumberdaya adalah faktor penting untuk kemudahan dan mencapai target dalam melaksanakan tugas agar mencapai tujuan yang tercantum didalam tupoksi atau sebuah peraturan. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Dalam melakukan pengembangan wisata alam tentunya yang paling utama adalah anggaran yang cukup sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan, sehingga wisata alam bisa dikelola dengan baik dan selalu melakukan inovasi baik itu fasilitas-fasilitas untuk menikmati wisata alam di sana maupun juga tempat-tempat view berfoto yang juga menjadi salah satu kebutuhan dari masyarakat sebagai pengunjung.

Di dalam indikator ini ada tiga poin penilaian sebagai pendukung indikator Ke dua yaitu, Menjadi Kawasan Air Terjun Tembulun Ke dalam Prioritas Pengembangan Wisata, Menyediakan Sumber Daya Anggaran Dalam Upaya Pengembangan, Kondisi Di Lokasi Objek Wisata Air Terjun Tembulun memberikan kenyamanan Bagi Pengunjung Wisata, pembahasan tentang masing-masing sub indikator tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk tabel dan penyajian analisis berdasarkan masing-masing jawaban sub indikatornya, dan disetiap poin akan dinilai dalam jawaban seperti kategori Terlaksana (T), Cukup Terlaksana (CT), Kurang Terlaksana (KT). Untuk melihat lebih jelas terkait dengan penyajian datanya, maka penulis akan sajikan melalui tabel berikut ini:

Tabel V.5 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pertama (Sumber Daya)

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Menjadi Kawasan Air Terjun Tembulun Ke dalam Prioritas Pengembangan Wisata	9 (26%)	20 (57%)	6 (17%)	35 (100%)
2	Menyediakan Sumber Daya Anggaran Dalam Upaya Pengembangan	11 (31%)	14 (40%)	10 (29%)	35 (100%)
3	Kondisi Di Lokasi Objek Wisata Air Terjun Tembulun memberikan kenyamanan Bagi Pengunjung Wisata	11 (31%)	16 (46%)	8 (23%)	35 (100%)
Jumlah		31	50	24	105
Rata-Rata		10	17	8	35
Persentase		29%	49%	23%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2020

Berdasarkan hasil kuisioner yang dipaparkan dalam bentuk tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban paling dominan yang diberikan oleh masyarakat adalah berada pada kategori “Cukup Terlaksana” yaitu rata-rata 17 orang dengan persentasenya adalah 49% responden, dimana alasan yang mendasari responden masyarakat memberikan jawaban tersebut adalah dimana masyarakat beranggapan bahwa Pemerintah Daerah belum melakukan tugasnya dalam mengembangkan objek wisata Air Tembulun, hal ini dilihat dari kondisi dilokasi objek wisata yang memang terlihat kurang terawatt dan kurang lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh pengelola objek wisata itu sendiri.

Selanjutnya adalah hasil jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang berada pada kategori jawaban “Terlaksana” dengan jumlah responden masyarakat yang memberikan jawaban adalah sebanyak 10 orang dengan persentase 29%, dimana alasan yang diberikan oleh responden tersebut dengan memiliki jawaban kategori terlaksana adalah bahwa masyarakat selaku pengunjung dilokasi tersebut berpendapat bahwa objek wisata air terjun sudah cukup terkenal, hal ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa dalam proses pengenalan objek wisata tersebut kemasyarakat tentunya melibatkan peran dari Pemerintah Daerah. Dan yang terakhir jawaban paling minim yang diberikan oleh responden masyarakat yang mana berada pada kategori “Kurang Terlaksana” yaitu rata-rata 8 orang dan dalam persentasenya mencapai angka 23%, hal ini dikarnakan bahwa ada sebagian masyarakat menilai wisata tembulon ini tidak memiliki ciri khasnya sehingga tidak ada daya tarik yang membuat pengunjung untuk datang kedua kalinya, jadi jika pengunjung telah melakukan kunjungan untuk pertama kalinya, pasti tidak memiliki keinginan untuk datang lagi ke lokasi tersebut karna kurangnya fasilitas dan infrastrukur yang tersedia.

Untuk melengkapi jawaban yang penulis telah berikan diatas, maka selanjutnya penulis akan menyajikan jawaban yang penulis dapatkan dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang berasal dari pihak Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak H. Syahrudin, S.Sos., MT selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, adapun pertanyaan yang penulis ajukan kepada beliau tentunya berkaitan dengan pembahasan Sub Indikator yang kedua yaitu tentang ketersediaan Sumber Daya, dan jawaban yang diberikan oleh informan dari Dinas tersebut adalah:

“Kita selalu mendukung dan berusaha mengembangkan seluruh kawasan yang menjadi tempat strategis objek wisata di Kabupaten Indragiri Hulu, jadi tidak ada siapa yang prioritas dan siapa yang minoritas, kita akan upayakan seluruh objek wisata yang terdaftar akan menerima perhatian dalam usaha pengembangan kemajuan lokasinya masing-masing” (Wawancara, 9 Juni 2020, Bapak H. Syahrudin, S.Sos., MT selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu)

Selain dari penetapan program prioritas terhadap objek wisata air terjun tembulun, penulis juga menanyakan perihal tentang ketersediaan anggaran untuk proses pengembangan objek wisata tersebut, dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Syahrudin, S.Sos., MT adalah sebagai berikut:

“Setiap tahun pastinya anggaran akan disediakan oleh Pemerintah, karna memang Dinas ini kan bergerak di bidang pengembangan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu, secara otomatis akan dialokasikan anggaran untuk hal tersebut.” (Wawancara, 9 Juni 2020, Bapak H. Syahrudin, S.Sos., MT selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, ditemukan kesimpulan bahwa pelaksanaan program kerja oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan secara merata tanpa membedakan mana objek pariwisata yang unggulan dan non unggulan, serta untuk mendukung program tersebut, Pemerintah juga telah menyediakan anggaran untuk program-program kerja tersebut, tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil Observasi yang penulis lakukan dilapangan, dimana jika dilakukan perbandingan secara fisik, Objek Wisata Air Terjun Tembulun sangat jauh tertinggal secara pengembangan dari objek wisata Danau Raja, hal ini tentunya saja memberikan fakta baru bahwa

memang dalam proses pengembangan objek wisata di Kabupaten Indragiri Hulu, pihak Pemerintah Indragiri Hulu melalui Dinas Pariwisata belum menjalankan kebijakan pengembangan pariwisata Daerah secara merata di Kabupaten Indragiri Hulu itu sendiri.

Dalam upaya mencari jawaban yang paling sesuai dengan fakta dilapangan, maka penulis juga akan melakukan wawancara dengan pihak Pengelola Air Terjun Tembulun yang terletak di Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku, dimana informan yang penulis wawancarai adalah Bapak Putra Hermansyah, Selaku Penjaga Objek Wisata Air Terjun Tembulun, dimana tanggapan yang diberikan oleh beliau terhadap pertanyaan penulis seputar pelaksanaan program-program yang melibatkan pengelola objek wisata air terjun tembulun itu sendiri, dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Sampai saat ini saya sendiri belum pernah menerima tamu dari pihak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, saya kira program-program yang mereka kerjakan tidak sampai ke kami di Desa Pejangki ini” (Wawancara, 10 Juni 2020, Bapak Putra Hermansyah, Penjaga Objek Wisata Air Terjun Tembulun)

Dari hasil pengamatan penulis dilapangan, dimana hal ini dilakukan dengan cara observasi langsung, penulis menemukan fakta terkait dengan pembahasan indikator yang ke dua tentang ketersediaan sumber daya dan bagaimana pihak Dinas Pariwisata menjalankan program kerjanya, dimana fakta yang penulis temukan dilapangan adalah tidak adanya perkembangan yang mengarah ke proses pengembangan dari objek wisata air terjun tembulun itu sendiri, lokasi yang dijadikan sebagai tempat pemandian air terjun tembulun masih membutuhkan sentuhan dan bantuan Pemerintah untuk membangun sarana

dan fasilitas-fasilitas pendukung untuk mempermudah pengunjung datang dan membuat kesan yang baik dan membuat pengunjung akan berkeinginan untuk datang kedua kalinya setelah kunjungan mereka.

3. Disposisi

Disposisi adalah suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh, atau disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator/pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif (Edward III, 2008:90-92)

Jadi sebagai implementor/pelaksana harus memiliki watak atau sifat yang penuh tanggung jawab, berkomitmen dalam menjalankan tugas sama halnya dengan Pemerintahan Indragiri Hulu khususnya pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengembangkan objek wisata yang ada di Indragiri Hulu. Tidak cukup hanya menyediakan fasilitas pada objek wisata tetapi juga harus membeirkan inovasi dan selalu gencar dalam mengenalkan objek wisata kepada masyarakat, sehingga masyarakat khususnya di Riau mengetahui adanya objek wisata dan tidak perlu lagi jauh-jauh ke luar daerah untuk berlibur atau berkunjung objek wisata ke daerah lain.

Di dalam indikator ini ada tiga poin penilaian sebagai pendukung indikator Ke tiga yaitu, Program pengembangan potensi kawasan wisata air terjun tembulun

dilakukan secara berkelanjutan, Kemauan pemerintah dalam mengembangkan potensi air terjun tembulun, Pihak pengelola wisata air terjun tembulun mengenakan tiket kepada pengunjung atau wisatawan yang hendak memasuki kawasan wisata tersebut, dan dalam mengetahui jawaban yang penulis dapatkan dari responden pengunjung, maka disetiap poin akan dinilai dalam kategori Terlaksana (T), Cukup Terlaksana (CT), atau Kurang Terlaksana (KT). Dengan demikian, maka untuk melihat lebih jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka akan disajikan dalam bentuk tabel dan analisis dibawah ini:

Tabel V.6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pertama (Disposisi)

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Program pengembangan potensi kawasan wisata air terjun tembulun dilakukan secara berkelanjutan	9 (26%)	18 (51%)	8 (23%)	35 (100%)
2	Kemauan pemerintah dalam mengembangkan potensi air terjun tembulun	7 (20%)	9 (26%)	19 (54%)	35 (100%)
3	Pihak pengelola wisata air terjun tembulun mengenakan tiket kepada pengunjung atau wisatawan	11 (31%)	16 (46%)	8 (23%)	35 (100%)
Jumlah		27	43	35	105
Rata-Rata		9	14	12	35
Persentase		26%	40%	34%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2020

Berdasarkan hasil kuisioner yang disajikan dalam bentuk tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban paling dominan yang diberikan oleh responden masyarakat adalah jawaban yang berada pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan rinciannya yaitu memiliki nilai rata-rata 14 orang dari keseluruhan total jumlah, dan diikuti dengan persentasenya yaitu sebesar 40%, dalam proses penyebaran kuesioner yang penulis lakukan, penulis juga menanyakan alasan responden memberikan jawaban mereka pada kategori tersebut, dan alasan yang diberikan oleh responden dalam memberikan jawaban pada kategori ini adalah, mereka beranggapan bahwa Pemerintah Daerah sebenarnya telah memberikan perhatian mereka terhadap pengembangan Air terjun tembulun di Desa Pejangki tersebut, hal tersebut dengan di lakukannya peresmian pada beberapa tahun yang lalu, tetapi secara keseluruhan, Pemerintah Daerah tidak memiliki focus yang jelas tentang bagaimana konsep pengembangan yang akan dilakukan khususnya untuk wilayah kawasan objek wisata air terjun tembulun di Desa Pejangki.

Selanjutnya hasil penyebaran kuesioner yang berhasil dikumpulkan dari jawaban responden masyarakat yang berkunjung ke lokasi objek wisata air terjun tembulun adalah jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana” dengan nilai rata-rata mencapai 12 orang di ikuti dengan persentase mencapai 34%, alasan yang diberikan responden kenapa mereka memilih jawaban tersebut adalah dikarenakan tidak adanya perkembangan terhadap kondisi infrastruktur di lokasi objek wisata, beberapa informan yang penulis mintai keterangan mengakui telah beberapa kali datang lokasi tersebut dan tidak melihat adanya perkembangan yang signifikan, dan cenderung memang tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, hal inilah yang menjadi alasan responden memberikan jawaban dengan kategori diatas.

Dan jawaban yang paling sedikit dalam pembahasan indikator yang ke tiga ini adalah jawaban pada kategori “Terlaksana”, dimana jumlahnya ada sebanyak 9 orang yang memberikan jawaban mereka, dengan persentase hanya mencapai 9% dari keseluruhan informan yang dipilih, adapun alasan responden memilih jawaban ini dikarenakan mereka beranggapan ketersediaan dan keleluasaan masyarakat mengelola lokasi objek wisata tersebut merupakan campur tangan dari Pemerintah Daerah, dengan memberikan perizinan dan pemungutan retribusi tiket masuk ke lokasi air terjun.

Untuk melengkapi jawaban yang telah disajikan diatas, penulis akan menyajikan hasil penelitian dilapangan lainnya yang juga juga bisa dijadikan sebagai jawaban pembanding, dimana proses pengumpulan data pada proses kali ini adalah dengan mewawancarai langsung informan yang dipilih, yaitu Bapak H. Syahrudin, S.Sos., MT selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, pertanyaan penulis terhadap beliau adalah tentang bagaimana upaya terkait dengan program-program yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Pasti ada program, setiap tahun kita akan melakukan inovasi program untuk tujuan bagaimana agar dunia pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu ini dapat berjalan dengan baik dan dikenal oleh masyarakat luas, tetapi memang untuk tahun ini tampaknya banyak program yang tidak bisa di lanjutkan karna adanya permasalahan pandemic covid19, beberapa program yang memang bertujuan untuk mengumpulkan massa, terpaksa di batalkan demi mengikuti anjuran dari Pemerintah Pusat terkait dengan protocol kesehatan, dan berharap Tahun depan kita bisa melanjutkan program-program yang sudah di rencanakan tersebut. (Bapak H. Syahrudin, S.Sos., MT selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang pelaksanaan program-program banyak yang dibatalkan, khususnya terkait dengan festival-festival dan beberapa program seminar yang telah disusun untuk pengembangan objek wisata di Kabupaten Indragiri Hulu, hal ini merupakan dampak dari adanya wabah pandemic yang menyerang dunia saat ini, tetapi diluar dari hal tersebut, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu mengatakan bahwa mereka akan terus melanjutkan program-program mereka setelah permasalahan terkait dengan pandemic Covid19 ini selesai dan sudah aman secara normal untuk beraktivitas.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*). *SOP* menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. (Edward III, 2008:90-92)

Di dalam indikator ini ada tiga poin penilaian sebagai pendukung indikator Ke empat yaitu, Koordinasi Pemerintah dengan Masyarakat Setempat Dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Tembulun, Menyediakan Bidang Khusus Dalam Menjalankan Tugas Di Bidang Pengembangan Pariwisata, Peran

Pemerintah Daerah dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Air. Dimana pembahasan disetiap poinnya akan dinilai dalam kategori jawaban antara Terlaksan (T), Cukup Terlaksana (CT), Kurang Terlaksana (KT) untuk lebih jelasnya penulis menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pertama (Struktur Birokrasi).

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Koordinasi Pemerintah dengan Masyarakat Setempat Dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Tembulun	7 (20%)	9 (26%)	19 (54%)	35 (100%)
2	Menyediakan Bidang Khusus Dalam Menjalankan Tugas Di Bidang Pengembangan Pariwisata	11 (31%)	16 (46%)	8 (23%)	35 (100%)
3	Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Air	5 (14%)	17 (49%)	13 (37%)	35 (100%)
Jumlah		23	42	40	105
Rata-Rata		8	14	13	35
Persentase		23%	40%	37%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2020

Berdasarkan hasil kuisioner yang dipaparkan dalam bentuk tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban paling dominan yang diberikan oleh masyarakat adalah berada pada kategori “Cukup Terlaksana” yaitu rata-rata 14 orang dengan persentasenya adalah 40%, di ikuti dengan jawaban pada kategori “Kurang

Terlaksana” dengan rata-rata jawaban yaitu sebanyak 13 orang responden, dan yang terakhir adalah jawaban responden pada kategori “Terlaksana” dengan rata-rata jumlah responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 8 orang responden dengan persentase mencapai 23%.

Selain dari jawaban diatas, penulis juga akan menyajikan jawaban hasil penelitian lapangan yang di dapat melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memahami kondisi masalah yang di teliti, dimana salah satunya adalah pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu yang diwakilkan oleh Bapak H. Syahrudin, S.Sos., MT selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, adapun jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan tentang Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata air terjun tembulun di Desa Pejangki adalah sebagai berikut:

“Koordinasi pasti ada, kata lainnya adalah kita menggandeng masyarakat untuk ikut andil dalam pengembangan pariwisata tersebut, masyarakat diberikan wewenang untuk mengutip retribusi tiket masuk ke lokasi air terjun, hal ini tentu saja bertujuan untuk mengumpulkan dana agar nantinya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau fasilitas yang ada di lokasi tersebut, kita juga juga mengupayakan agar nantinya masyarakat memiliki produk sendiri yang bisa dijual dan menjadi cendramata bagi pengunjung yang datang dr luar daerah, selain itu kita tentunya punya tim yang akan selalu memantau perkembangan disetiap lokasi pariwisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu”. (Wawancara, 9 Juni 2020, Bapak H. Syahrudin, S.Sos., MT selaku Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu) Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu)

Selain hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak pengelola tempat wisata air terjun tembulun di Desa Pejangki, dimana dalam hal ini yang diwawancarai adalah Bapak Putra Hermansyah, Penjaga Objek Wisata Air Terjun Tembulun, pertanyaan penulis terhadap beliau adalah tentang adanya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat disekitar lokasi air terjun berada, dan jawaban yang beliau berikan kepada penulis adalah berikut ini:

“Saya kurang paham koordinasi itu seperti apa, kalau dikatakan apakah Pemerintah Melibatkan kami untuk mengembangkan objek wisata ini, saya kira benar, karna perizinan terkait dengan pemungutan tiket masuk ke area air terjun merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, baik itu Kepala Desa, ataupun Dinas Pariwisata juga” (Wawancara, 10 Juni 2020, Bapak Putra Hermansyah, Penjaga Objek Wisata Air Terjun Tembulun)

Berdasarkan hasil yang telah di sajikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam mengelola objek wisata air terjun tembulun memang sudah dilakukan, dan fakta yang penulis temukan dilapangan setelah dilakukan observasi adalah bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan hanya sekedar pemberian izin untuk melakukan pemungutan retribusi dan juga himbauan untuk membentuk suatu kelompok yang dapat memberikan dampak kepada cirri khas lokasi air terjun tersebut, dimana salah satu contohnya adalah kelompok masyarakat yang bisa membuat kerajinan tangan atau kerajinan yang memiliki cirri khas air terjun tersebut, hal ini tentunya masih kurang efektif untuk mendongkrak perkembangan popularitas dan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur jalan menuju ke lokasi wisata tersebut.

C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan dimasing-masing indikator di atas yang mana diantaranya adalah indikator yang pertama yang membahas tentang “Komunikasi” kemudian indikator yang kedua adalah “Sumber Daya”, indikator ke tiga “Disposisi” dan indikator ke empat adalah “Struktur Birokrasi”, dan di dukung dengan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan yang mana penulis melakukan proses observasi pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan serta mengunjungi langsung ke lokasi objek wisata air terjun tembulun, hal ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian yang penulis dapatkan dari penyebaran kuesioner dan wawancara dengan pihak Pemerintahan Desa, sehingga mendapatkan perbandingan pada hasil dan mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Setelah dilakukannya proses perhitungan pada masing-masing indikator yang dipaparkan berbentuk tabel frekuensi, maka penulis akan membuat rekapitulasi dari hasil keseluruhan tabel-tabel pada indikator, agar mendapatkan hasil secara keseluruhannya, dan bisa ditarik kesimpulan secara keseluruhan pada penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Jadi ke-empat indikator yang dijabarkan di atas, maka penulis dapat membuat rekapitulasi untuk mengetahui hasil secara keseluruhannya. Berikut hasil rekapitulasi dari hasil kuesioner yang disebarkan pada masyarakat:

Tabel V.8 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Komunikasi	8 (23%)	17 (49%)	10 (29%)	35 (100%)
2	Sumber Daya	10 (29%)	17 (49%)	8 (23%)	35 (100%)
3	Disposisi	9 (26%)	14 (40%)	12 (34%)	35 (100%)
4	Struktur Birokrasi	8 (23%)	14 (40%)	13 (37%)	35 (100%)
Jumlah		35	62	43	140
Rata-Rata		9	15	11	35
Persentase		26%	43%	31%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2020

Berdasarkan data pada tabel V.8 di atas dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan secara langsung terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menggunakan teori Edward III (2008:90-92) sebagai tolak ukur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dengan di dasari pelaksanaan penyebaran kuesioner kepada responden dari pihak masyarakat yang ada disekitar, maka penulis menemukan kesimpulan dari jawaban paling dominan yang diberikan oleh responden masyarakat ada pada jawaban dengan kategori “Cukup Terlaksana” dengan rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 15 orang dari total responden yaitu 35 orang dengan persentase sebesar 43%.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, dan dikaitkan dengan hasil jawaban yang diperoleh pada pembahasan penyebaran kuesioner yang disajikan dalam bentuk tabel diatas, maka fakta yang penulis temukan dilapangan adalah bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya objek wisata air terjun tembulun belum berjalan dengan baik, perhatian Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mengarah kepada pemerataan pengembangan pariwisata baik itu pariwisata unggulan yang sudah memiliki nama besar dan juga pariwisata yang memang masih dalam proses pembangunan atau berkembang, salah satu observasi yang penulis temukan terkait pemerataan pembangunan dan pengembangan lokasi wisata adalah perbandingan antara Objek Wisata Danau raja yang ada di Rengat, dimana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sepertinya sangat gencar malukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan cara bagaimana cara untuk menarik minat wisatawan agar mau datang ke Danau tersebut, mulai dari pengadaan festival-festival, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya.

Sementara itu, proses pengembangan objek wisata air terjun tembulun yang menjadi kebanggan bagi masyarakat Desa Pejangki terbilang lambat dan hampir tidak menerima perhatian dari Pemerintah Daerah, padahal, apabila objek wisata ini di kembangkan, akan menjadi pembangkit perekonomian masyarakat Desa itu sendiri, hal inilah yang memang menjadi salah satu alasan kenapa hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban “Cukup Terlaksana” dari responden masyarakat yang penulis jumpai di lokasi objek wisata tersebut, masyarakat memberikan tanggapan mereka berdasarkan apa yang mereka lihat di lokasi wisata air terjun tembulun itu sendiri.

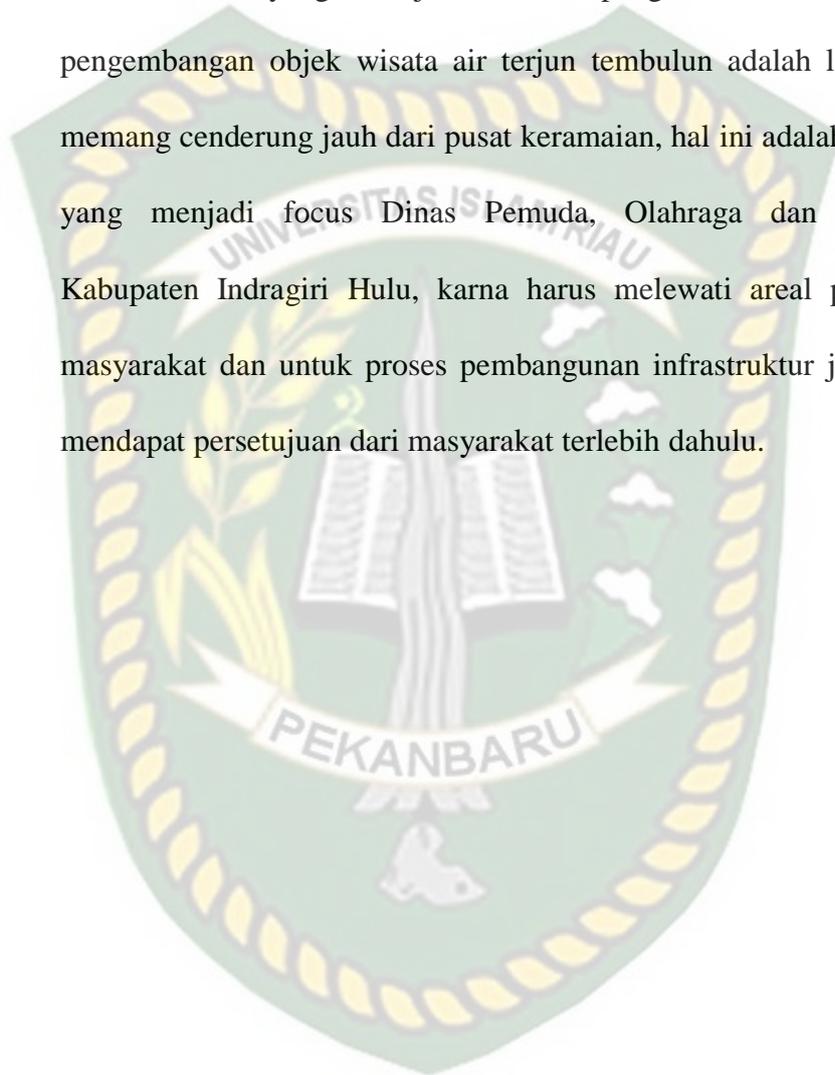
D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Dalam menjalankan program-program yang diberikan kepada Dinas Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan, tentunya sumber daya manusia yang menjalankan program tersebut mengalami beberapa kendala dilapangan, dan untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan program pengembangan pariwisata khususnya wisata air terjun tembulun di Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

1. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak H. Syahrudin, S.Sos., MT pada tanggal 9 Juni 2020, yang menjabat sebagai kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, beliau mengatakan bahwa salah satu kendala yang di hadapi dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Indragiri Hulu adalah keterbatasan anggaran untuk membaginya keseluruh lokasi-lokasi yang berpotensi, anggaran yang dimiliki dalam membangun sarana dan prasarana yang harus tersedia di setiap objek wisata memang sangat terbatas, tetapi diluar itu, beliau juga mengatakan bahwa nantikan semua objek wisata tersebut akan diperhatikan, khususnya setelah masalah pandemic Covid19 ini selesai, akan dilakukan kembali penyusunan program-program, yang salah satunya pengembangan objek wisata air terjun tembulun.
2. Masalah kedua adalah koordinasi yang memang belum berjalan dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum yang nantinya bisa

membantu pengembangan objek wisata air terjun tembulun tersebut dengan cara perbaikan infrastruktur jalan menuju ke lokasi.

3. Permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam proses pengembangan objek wisata air terjun tembulun adalah lokasi yang memang cenderung jauh dari pusat keramaian, hal ini adalah salah satu yang menjadi fokus Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, karna harus melewati areal perkebunan masyarakat dan untuk proses pembangunan infrastruktur jalan, harus mendapat persetujuan dari masyarakat terlebih dahulu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta pembahasan hasil pada masing-masing indikator, maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, dimana kesimpulan yang dihasilkan adalah ditemukannya fakta bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya objek wisata air terjun tembulun belum berjalan dengan baik, perhatian Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mengarah kepada pemerataan pengembangan pariwisata baik itu pariwisata unggulan yang sudah memiliki nama besar dan juga pariwisata yang memang masih dalam proses pembangunan atau berkembang, salah satu observasi yang penulis temukan terkait pemerataan pembangunan dan pengembangan lokasi wisata adalah perbandingan antara Objek Wisata Danau raja yang ada di Rengat, dimana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sepertinya sangat gencar malukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan cara bagaimana cara untuk menarik minat wisatawan agar mau datang ke Danau tersebut, mulai dari pengadaan festival-festival, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya.

Sementara itu, proses pengembangan objek wisata air terjun tembulun yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Desa Pejangki terbelang lambat dan hampir tidak menerima perhatian dari Pemerintah Daerah, padahal, apabila objek wisata ini di kembangkan, akan menjadi pembangkit perekonomian masyarakat

Desa itu sendiri, hal inilah yang memang menjadi salah satu alasan kenapa hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban “Cukup Terlaksana” dari responden masyarakat yang penulis jumpai di lokasi objek wisata tersebut, masyarakat memberikan tanggapan mereka berdasarkan apa yang mereka lihat di lokasi wisata air terjun tembulun itu sendiri.

Selain kesimpulan yang telah disajikan diatas, dalam menjalankan program-programnya, Dinas Olahraga dan Pariwisata dan Kebudayaan, tentunya akan menghadapi beberapa kendala dilapangan yang menghambat pelaksanaan tugas mereka, dan untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan program pengembangan pariwisata khususnya wisata air terjun tembulun di Kabupaten Indragiri Hulu, dimana kendala-kendala tersebut salah satunya adalah berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak H. Syahrudin, S.Sos., MT pada tanggal 9 Juni 2020, yang menjabat sebagai kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, beliau mengatakan bahwa salah satu kendala yang di hadapi dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Indragiri Hulu adalah keterbatasan anggaran untuk membaginya keseluruhan lokasi-lokasi yang berpotensi, anggaran yang dimiliki dalam membangun sarana dan prasarana yang harus tersedia di setiap objek wisata memang sangat terbatas, tetapi diluar itu, beliau juga mengatakan bahwa nantikan semua objek wisata tersebut akan diperhatikan, khususnya setelah masalah pandemic Covid19 ini selesai, akan dilakukan kembali penyusunan program-program, yang salah satunya pengembangan objek wisata air terjun tembulun.

Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah terkait dengan koordinasi yang memang belum berjalan dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan

Umum yang nantinya bisa membantu pengembangan objek wisata air terjun tembulun tersebut dengan cara perbaikan infrastruktur jalan menuju ke lokasi. Serta yang terakhir adalah kendala yang berkaitan dengan lokasi objek yang memang cenderung jauh dari pusat keramaian, hal ini adalah salah satu yang menjadi focus Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu, karna harus melewati areal perkebunan masyarakat dan untuk proses pembangunan infrastruktur jalan, harus mendapat persetujuan dari masyarakat terlebih dahulu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu pada pembahasan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran-saran yang nantinya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan kebijakan-kebijakan dibidang pengembangan pariwisata di Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Saran penulis kepada pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu adalah terkait dengan penyusunan program kerja yang merata dan membangun secara menyeluruh tempat-tempat objek wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, tidak hanya berfokus kepada beberapa lokasi yang dianggap unggulan saja.
2. Menambah jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan tempat wisata di Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga nantinya dapat menjalankan program secara merata dan tidak kekurangan anggaran dalam proses pelaksanaan dilapangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adisumardjo.1989Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kansil, CST, dan Cristine, 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta, Jakarta Bumi Aksara
- Komarudin1994, Manajemen, Pustaka Jaya, Bandung
- Kunarjo, 1996, Mamajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia,Jakarta PT. Gunung Agung.
- Marpaung. Happy et al, 2002 PengantarPariwisata, Bandung Alfabeta,
- Musanef , 1992, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Ghalia Indonesia Jakarta
- Nawawi, Hadari, 2003,Yogyakarta.Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press
- Ndraha,Taliziduhu. 2005. Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama. Tangerang Banten, Sirao Credentia Center.
- Ngapena, Chafid, 2003, Yogyakarta.Dasar-Dasar manajemen kepariwisataan alam, Libery.
- Nugroho D, Riant.2003, Kebijakan publik “formulasi implementasi, dan evaluasi”.PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Nyoman. S. Pandit, 2004 Ilmu Pariwisata, PT. Paradya Paramita, PT. Angkasa, Bandung.
- Peraturan BupatiNomor 80 Tahun 2016 susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan PariwisataKabupaten Indragiri Hulu
- Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021

Spillane, James, 2001, Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi Dan Rekayasa Kebudayaan, Yogyakarta Kanisus,.

Subarsono, 2008, Dasar-Dasar Pariwisata, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

WahabSalah, 1988, Pemasaran Pariwisata, , BandungPradya Paramita

Yoeti,Oka A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata, Jakarta.PT. Penerbit Angkasa,

